



**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)
TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S 1)
Pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*

Oleh:

Aulia Zikra Afmelda
NIM: 2130401023

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025M/1447H**

ABSTRAK

Aulia Zikra Afmelda, NIM 2130401023, judul skripsi “Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun Akademik 2025.

Berdasarkan teori keagenan, mekanisme pengawasan melalui Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit diharapkan dapat meminimalisasi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, sehingga mendorong peningkatan *kinerja keuangan*. Namun, realita menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Pada periode 2019–2020, meskipun indikator GCG pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BTPN Syariah mengalami peningkatan, kinerja keuangan yang diukur dengan ROA justru tidak menunjukkan perbaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa laporan keuangan bank syariah yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan model Random Effect, serta uji asumsi klasik untuk menguji validitas model.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit, baik secara parsial maupun simultan, tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa variasi kinerja keuangan hanya dijelaskan sebagian kecil oleh GCG, sedangkan sebagian besar dipengaruhi faktor eksternal seperti pandemi Covid-19, kondisi makroekonomi, serta dinamika industri perbankan syariah. Dengan demikian, penerapan GCG belum sepenuhnya mampu meningkatkan kinerja keuangan bank syariah selama periode penelitian.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, ROA, Bank Syariah

ABSTRACT

Aulia Zikra Afmelda, Student ID 2130401023, thesis title: “*The Effect of Good Corporate Governance (GCG) on the Financial Performance of Islamic Banks Listed on the Indonesia Stock Exchange*”. Study Program of Islamic Banking, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic University Mahmud Yunus Batusangkar, Academic Year 2025.

Based on agency theory, supervisory mechanisms through the Independent Board of Commissioners and the Audit Committee are expected to minimize conflicts of interest between management and shareholders, thereby encouraging improvements in financial performance. However, in practice, there remains a gap between theory and reality. During the 2019–2020 period, although GCG indicators in Bank Syariah Indonesia (BSI) and BTPN Syariah showed improvement, financial performance measured by ROA did not indicate significant progress. This study aims to analyze the effect of the Independent Board of Commissioners and the Audit Committee on the financial performance of Islamic banks listed on the Indonesia Stock Exchange.

This research is a quantitative study with an associative approach. The data used are secondary data derived from the financial statements of Islamic banks listed on the Indonesia Stock Exchange. The method applied is panel data regression with the Random Effect Model, along with classical assumption tests to examine model validity.

The results indicate that both the Independent Board of Commissioners and the Audit Committee, either partially or simultaneously, have no significant effect on financial performance. The coefficient of determination (R^2) shows that variations in financial performance are only partly explained by GCG, while the majority are influenced by external factors such as the Covid-19 pandemic, macroeconomic conditions, and the dynamics of the Islamic banking industry. Thus, the implementation of GCG has not yet been able to fully improve the financial performance of Islamic banks during the research period.

Keywords: Good Corporate Governance, Independent Board of Commissioners, Audit Committee, ROA, Islamic Banks

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas ridho dan hidayah-Nya, serta memberikan limpahan rahmat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam senantiasa terlimpah dan tercurah untuk Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Adapun judul skripsi ini adalah “Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih yang istimewa pada kedua orang tua penulis Ayahanda Afrizal K dan Ibunda Melfitriani yang telah memberikan dorongan dan motivasinya, dan kasih sayangnya serta saudara terkasih. Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga atas segala do'a, perhatian, dorongan serta pengorbanannya baik moril maupun materil selama penulis dalam pendidikan hingga selesai.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan, motivasi, bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak. Semoga dengan bantuan tersebut dapat menjadi amal ibadah dan di balas oleh Allah SWT, dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dalam dunia pendidikan. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M. Res., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Mohammad Aliman Shahmi, ME selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.

4. Dr. H. Rizal Fahlefi, S. Ag., M.SI selaku penasehat akademik yang telah membantu serta memberikan saran kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan.
5. Elmiliyani Wahyuni, M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan semangat, dorongan, arahan dan bimbingan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Siska Febriyanti, S. Pd.,M.Pd.E selaku penguji dalam seminar proposal yang banyak memberikan saran.
7. Seluruh Civitas Academika di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar untuk setiap ilmu serta jasa yang diberikan selama perkuliahan.

Akhirnya, kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat membantu memberi manfaat kepada kita semua.

Batusangkar, Agustus 2025
Penulis,

Aulia Zikra Afmelda
NIM.2130401023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional	11
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Landasan Teori	14
1. Kinerja Keuangan.....	14
2. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	20
3. Hubungan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap ROA	33
B. Penelitian Yang Relevan	34
C. Kerangka Berpikir.....	37
D. Hipotesis.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian	40
C. Sumber Data	41

E. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Hasil Penelitian.....	53
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	53
2. Analisis Deskriptif.....	60
3. Statistic Deskriptif.....	60
4. Hasil Uji Regresi Data Panel	62
5. Uji Asumsi Klasik	65
6. Analisis regresi data panel	70
7. Uji Hipotesis	71
B. Pembahasan	75
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan <i>Return on Assets</i> (ROA) Perbankan Syariah Tahun 2019-2023 (Dalam Persen).....	8
Tabel 3. 1 Jadwal Kegiatan Penulisan Skripsi	40
Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif.....	60
Tabel 4. 2 Hasil Uji <i>Chow</i>	62
Tabel 4. 3 Hasil Uji Hausman	63
Tabel 4. 4 Hasil Uji Lagrange Multiplier	64
Tabel 4. 5 Hasil estimate <i>random effect</i> model.....	65
Tabel 4. 6 Hasil uji multikolinearitas.....	67
Tabel 4. 7 Hasil uji heteroskedastisitas	68
Tabel 4. 8 Hasil uji Autokorelasi.....	69
Tabel 4. 9 Hasil uji regresi data panel model REM.....	70
Tabel 4. 10 Hasil Uji Hipotesis	72
Tabel 4. 11 Hasil Uji Simultan.....	73
Tabel 4. 12 Hasil uji koefisien Determinan (R^2)	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Hasil uji Jarque Bera.....	66
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bursa efek adalah badan usaha yang didirikan oleh perusahaan-perusahaan efek yang berstatus sebagai anggota bursa efek tersebut. Anggota bursa efek adalah perusahaan efek (selaku perantara pedagang efek) yang dimana perusahaan telah memperoleh izin usaha dari Bapepam-Lk dan mempunyai hak untuk menggunakan sistem atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan pada bursa efek. Produk atau instrumen jasa keuangan yang diperdagangkan pada bursa efek adalah efek atau surat berharga yang berbentuk surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek. Bursa efek dalam menyediakan sarana perdagangan efek, lembaga perbankan turut memainkan peranan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi melalui mekanisme intermediasi keuangan (Haryani Iswi & Purnomo, 2010).

Sampai saat ini lembaga perbankan sangat memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan perekonomian di Indonesia. Hal juga ini berkaitan dengan tugasnya sebagai financial intermediary yaitu lembaga yang mempunyai peranan sebagai penghubung dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Indonesia memiliki berbagai jenis perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah (Saputra, 2020).

Bank syariah yang disebut Bank Islam, adalah bank yang beroperasi secara independen dari pendapatan. Bank Syariah atau biasa disebut “Bank Bebas”, adalah bank yang tugas dan asetnya didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Ini adalah organisasi moneter yang kegiatan utamanya adalah menyediakan dana dan berbagai manajemen dalam hal transfer kuota dan alokasi dana, kegiatannya telah dimodifikasi sesuai dengan hukum dan peraturan Islam. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut Bank Syariah

adalah bank yang berdiri sendiri. Bank Syariah atau biasa dikenal dengan istilah bank bebas bunga adalah lembaga perbankan yang mengembangkan layanan dan produk berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah pembiayaan dan pembayaran lainnya sesuai dengan dengan prinsip-prinsip hukum Syariah (Hania Pebriana, 2021).

Semakin ketatnya persaingan antarbank syariah maupun dengan bank konvensional, bank syariah dituntut untuk memiliki kinerja yang baik, agar dapat bersaing dalam pasar perbankan nasional di Indonesia (Rimardhani, 2016). Menurut Helfert, kinerja adalah hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus-menerus oleh manajemen. Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Dengan demikian, kinerja keuangan bank adalah gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Bank yang dapat menjaga kinerjanya dengan baik maka besar kemungkinan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga akan meningkat. Dimana hal ini merupakan indikator naiknya kepercayaan pasar dan masyarakat kepada bank (Novitasari, 2017).

Penilaian tingkat kinerja keuangan merupakan hal yang penting yang perlu dievaluasi segala jenis perusahaan termasuk perbankan, apakah kinerjanya terjadi penurunan atau kenaikan di setiap tahunnya. Hal ini penting untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam kebijakan dan strategi yang akan dilakukan di periode selanjutnya. Tingkat kinerja keuangan suatu perusahaan diukur dan digambarkan dalam rasio keuangan. Fahmi menyatakan bahwa rasio keuangan dan kinerja perusahaan memiliki hubungan yang erat, dimana rasio keuangan merupakan analisis yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan. Analisa rasio dilakukan dengan cara membandingkan rasio-rasio keuangan dari tahun-tahun sebelumnya yang dapat digunakan untuk memprediksi rasio periode berikutnya, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan (Saputra, 2020).

Banyak jenis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja bank, seperti ROE (*Return on Equity*), ROI (*Return on Investment*), PER (*Price Earning Ratio*), ROA (*Return on Assets*). Tetapi dalam penelitian ini rasio keuangan yang dipilih adalah ROA. Dengan alasan rasio ini dapat menggambarkan secara rinci penggunaan modal dan naik turunnya pendapatan (Hadyan, 2021). *Return on Asset* (ROA) adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang digunakan dalam mengukur tingkat pengembalian keuntungan dari total keseluruhan dana (asset) bank. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba), ketika ROA suatu bank tinggi, maka tingkat keuntungan yang dicapai bank juga tinggi sehingga dapat dianggap memiliki penggunaan asset yang baik (Saputra, 2020).

Untuk mengetahui rasio ini maka dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{total aset}} \times 100$$

Signalling Theory menjelaskan seberapa penting untuk mengukur suatu kinerja. *Signalling Theory* ini menjelaskan alasan perusahaan berkeinginan memberi penjelasan tentang laporan keuangannya kepada pihak luar yaitu dikarenakan terdapat asimetri informasi antara pihak eksternal dan perusahaan dikarenakan yang lebih paham adalah perusahaan mengenai prospek dan perusahaan di masa depan (Salsabila et al., 2023).

Agency Theory merupakan teori utama dimana teori ini dapat mengemukakan relasi *Corporate Governance* dengan kinerja keuangan. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kewirausahaan dewan bank menjadikan struktur tata kelola bank yang sangat baik sehingga konflik keagenan terkendali dan kekayaan pemegang saham meningkat (Salsabila et al., 2023).

Secara teoritis hubungan *good corporate governance* dengan kinerja keuangan perusahaan sangat berpengaruh karena diakui oleh Pramono, bahwa dengan menerapkan prinsip *good corporate governance* dapat mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya kembali, mudah memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah karena faktor

kepercayaan yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value* dan juga dapat meningkatkan kinerja keuangan suatu perusahaan dengan melalui terciptanya pengambilan keputusan yang lebih baik (Sari, 2021).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya membawa pengaruh terhadap kegiatan bisnis. Selain itu, banyak kasus pelanggaran dalam pengelolaan perusahaan seperti penyalahgunaan kekuasaan, KKN, manipulasi laporan keuangan, serta tindakan kejahatan lainnya yang berakibatkan merugikan perusahaan. Manajemen harus mampu mengembangkan dan menerapkan sistem serta strategi dan juga kebijakan yang ditetapkan perusahaan terutama dalam tata kelola perusahaan atau disebut *Good Corporate Governance* (GCG) (Rimardhani, 2016).

Lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* suatu perusahaan bisa membuat kondisi keuangannya menjadi memburuk. Hal ini terjadi karena dalam praktik tata kelola tidak memperhatikan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Melihat banyaknya kasus GCG yang ada di Indonesia menandakan bahwa GCG adalah salah satu faktor penting untuk menunjang keberhasilan suatu perusahaan dan juga untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam menghasilkan laba (Hadyan, 2021).

Konsep GCG di Indonesia diperkenalkan oleh Pemerintah Indonesia dan *Internasional Monetary Fund* (IMF) pasca krisis. GCG merupakan proses yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk meningkatkan usaha dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* dalam mencapai tujuan perusahaan dengan prinsip-prinsip seperti keterbukaan, pertanggungjawaban, akuntabilitas, independensi dan kewajaran. Tujuan GCG adalah meningkatkan nilai tambah, meningkatkan kemakmuran, serta diharapkan berdampak positif pada kinerja keuangan dan kontrol perusahaan. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan GCG dibutuhkan mekanisme tersistem untuk memantau kebijakan yang diterapkan (Rimardhani, 2016).

Konsep GCG merupakan seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal

sehubungan dengan hak hak dan tanggung jawab mereka (Djanegara, 2008). GCG dapat diartikan sebagai prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan sebuah perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada *shareholder* khususnya dan *stakeholders* pada umumnya. Tujuan GCG yakni untuk mengelola dan mengarahkan sebuah bisnis serta urusan lain dari sebuah perusahaan agar terjadi peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaannya (Rahmadani & Rahayu, 2017).

Penerapan program GCG akan meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan mengacu pada kondisi tertentu yang sudah dicapai oleh suatu perusahaan (Dianawati, 2016). Nilai perusahaan merupakan gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini. Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat. GCG dapat berpengaruh meningkatkan nilai perusahaan karena semakin baik tata kelola perusahaan (GCG) maka akan menjadikan perusahaan tersebut lebih efisien sehingga akan meningkatkan profit dan juga nilai perusahaan akan meningkat (Rahmadani & Rahayu, 2017).

Praktik GCG terhadap kinerja keuangan dalam upaya menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih efektif dan efisien dibutuhkan harmonisasi manajemen perusahaan dari Dewan Komisaris Independen dan dewan direksi serta pengawasan dari komite audit dan kepemilikan institusional dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Dewan Komisaris Independen ditempatkan untuk bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan, sedangkan dewan direksi menetapkan arah strategis, menetapkan kebijakan operasional dan bertanggung jawab memastikan tingkat kesehatan manajemen bank. Adanya komite audit dan kepemilikan institusional diharapkan fungsi pengawasan menjadi lebih optimal yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Independen dan direksi. Sehingga variabel-variabel dalam

GCG tersebut dalam hubungannya terhadap kinerja keuangan saling berkaitan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan kinerja keuangan (Adi & Suwarti, 2022).

Agency theory menjelaskan bahwa timbulnya konflik antara principal sebagai pemegang saham dan agent sebagai manajer. Konflik tersebut timbul karena perbedaan kepentingan yang timbul diantara kedua belah pihak. Menurut (Astriani, 2014) Kepemilikan Manajerial yaitu, besar kecilnya persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang berasal dari jumlah modal saham perusahaan yang dikelolanya. Kepemilikan saham oleh manajer yang rendah akan menimbulkan perilaku *opportunistic* manajer yang meningkat. Fungsi dari penerapan kepemilikan manajemen dalam suatu perusahaan adalah agar manajer dapat memaksimalkan kinerja dan meminimalkan terjadinya konflik keagenan. Oleh karena itu manajer akan bekerja dengan sangat hati-hati dan tidak akan melakukan tindakan kecurangan, karena jika terjadi sesuatu yang bertentangan dengan harga saham, maka manajer juga akan menanggung akibatnya, dan tidak lagi hanya pemegang saham yang menanggung kerugian, karena manajer masih memiliki saham di dalam perusahaan. (Andayani Anggy Ferrita Permata, 2013)

Dewan komisaris independen, yaitu perbandingan dari jumlah dewan komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan dengan jumlah anggota dewan komisaris. Dewan komisaris memiliki tugas melindungi seluruh kegiatan perusahaan, melakukan pengawasan kepada manajemen selaku pengurus perusahaan, dan mewajibkan adanya akuntabilitas. Menurut (Ria Anggraini dan Fidiana, 2021) Apabila jumlah dari dewan komisaris independen lebih unggul maka pengawasan dewan komisaris terhadap manajer akan lebih efektif. Dan dewan komisaris juga berperan sebagai pencegah beberapa konflik yang akan terjadi saat mereka melakukan pengawasan, serta mereka berhak memberikan nasihat kepada manajemen (Andayani Anggy Ferrita Permata, 2013).

Menurut Jensen dan Meckling dalam jurnal (Fajri, 2022) menyebutkan teori agensi, antara agen dan prinsipal terdapat asimetri informasi. Peran dewan komisaris independen sebagai penengah antara para manajer internal dan mengawasi kebijakan direksi serta bertugas sebagai pemberi nasihat kepada direksi diperlukan untuk mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Dengan perannya tersebut, dewan komisaris independen diharapkan mampu berlaku objektif untuk melindungi kepentingan para pemegang saham agar mendapatkan kesetaraan. Menurut Jensen dan Meckling, dewan komisaris independen yang tinggi akan berpengaruh pada semakin baiknya kinerja perusahaan karena semakin rendah kecenderungan konflik keagenan yang terjadi. Apabila proporsi dewan komisaris bertambah maka pengawasan yang dilakukan juga akan semakin ketat.

Menurut (Azis & Hartono, 2017) komite audit merupakan komite yang akan membantu dewan komisaris dalam mengoreksi laporan keuangan, apakah sudah disajikan dalam bentuk wajar dan telah mengikuti prinsip prinsip akuntansi yang telah berlaku. Sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, perusahaan yang terdaftar di publik atau BEI diharuskan membentuk komite audit. Diharapkan dengan dibentuknya komite audit maka, laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan akan tetap terpantau, yang dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya fraud, dan keberadaan komite audit juga dapat menimbulkan kepercayaan para pemegang saham untuk berinvestasi, yang dapat menyebabkan peningkatan nilai perusahaan. (Andayani Anggy Ferrita Permata, 2013)

Teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling dalam (Fajri, 2022) menyatakan bahwa asimetri informasi dan konflik kepentingan dapat diminimalisir dengan mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan. Peran komite audit sangat diperlukan untuk menciptakan proses pengawasan bagi manajemen, sehingga potensi kecurangan dapat teratasi, serta meningkatkan kinerja perusahaan. Adanya komite audit yang independen menjadi satu

upaya untuk melakukan perbaikan pada cara pengelolaan khususnya cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan, sehingga manajemen dapat bertindak sesuai dengan yang diharapkan oleh dewan komisaris (Lestari, 2013). Keanggotaan komite audit yang semakin meningkat dalam perusahaan akan memberikan fungsi yang optimal dalam mengawasi perilaku manajemen dan menciptakan laporan keuangan yang bebas dari kecurangan sehingga nantinya dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Berikut ini disajikan tabel data *Return On Assets* (ROA) dan *Good Corporate Governance* (GCG) perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan *Return on Assets* (ROA) Perbankan Syariah Tahun 2019-2023 (Dalam Persen)

NO	Indeks Komposit		2019	2020	2021	2022	2023
1	Bank	DKI	1.50	0.75	0.75	0.67	0.67
	Aladin	KA	5	4	3	4	4
	Syariah	ROA	10.80	6.22	-5.58	-5.60	-3.20
2	Bank	DKI	0.25	0.00	0.56	0.44	0.50
	Syariah	KA	5	4	8	6	7
	Indonesia	ROA	14.25	0.91	1.14	1.39	1.61
3	Bank	DKI	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75
	BTPN	KA	4	3	4	4	3
	Syariah	ROA	0.95	5.20	7.89	8.36	5.04
4	Bank	DKI	0.67	0.67	0.33	0.33	0.67
	Panin	KA	3	3	3	3	3
	Dubai Syariah	ROA	6.01	1.13	-5.67	1.69	1.31

Sumber: www.idx.co.id dan laporan keuangan dari berbagai sumber.

Berdasarkan data tabel diatas dapat kita ketahui bahwa tingkat pengembalian asset pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berbeda-beda. Terdapat gap antara teori dan realita dengan peneliti.

Seharusnya ketika GCG naik ROA juga naik akan tetapi pada BSI dan BTPN Syariah pada tahun 2019-2020 ketika GCG naik kinerja Keuangannya turun.

Penerapan *good corporate governance* menjadi pertimbangan yang sangat besar atas kepercayaan nasabah pada suatu bank syariah. Semakin bagus indeks komposit *good corporate governance* berarti bahwa sumber daya yang ada dalam bank tersebut baik. Penerapan pengukuran indeks komposit *good corporate governance* juga sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerja pegawai bank syariah itu sendiri. Dengan adanya penilaian tersebut seperti dewan komisaris, dan komite audit akan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya karena memiliki tanggung jawab dan standar kerja yang harus dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penerapan *Good Corporate Governance* yang kurang baik menjadikan kebanyakan para investor kurang tertarik untuk menanamkan sahamnya pada perbankan syariah.
2. Keuntungan atau laba yang diukur dengan ROA setiap tahunnya naik turun.
3. Kinerja Dewan Komisaris Independen tidak mempengaruhi kinerja keuangan
4. Kenaikan GCG tidak mempengaruhi peningkatan ROA yang meningkat
5. Naik turun nya komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
6. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan.
7. Pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah, agar penelitian lebih terarah maka penulis akan membatasi masalah ini hanya terhadap:

1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
3. Bagaimana Dewan Komisaris, Komite Audit terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

F. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dapat dijadikan sebagai referensi dan perbandingan bagi peneliti yang akan datang serta memotivasi mahasiswa melakukan penelitian lebih lanjut.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi penelitian lebih lanjut. Penelitian ini menambah pengetahuan dan referensi lain bagi mahasiswa yang membutuhkan.
- c. Meningkatkan pengetahuan penulis serta pembaca khususnya mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
- d. Sebagai wujud pengembangan dan disiplin ilmu ekonomi islam terutama di bidang perbankan syariah.

2. Luaran penelitian

Adapun luaran penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar
- b. Sebagai wujud pengembangan dan disiplin ilmu ekonomi islam terutama di bidang perbankan syariah

G. Definisi Operasional

1. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance dalam penelitian ini terdiri dari Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit.

Kepemilikan manajerial sangat bermanfaat dimana manajer ikut ambil bagian dari kepemilikan saham perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk menciptakan kinerja perusahaan secara optimal dan memotivasi manajer untuk bertindak secara hati hati. Dengan

demikian, semakin besar saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajerial maka akan memperbaiki kinerja keuangan perusahaan (Mauliddiyah, 2021).

Dewan Komisaris Independen merupakan pihak yang tidak diperkenankan memiliki hubungan apapun yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Pembentukan dewan komisaris independen diharapkan akan melindungi pemegang saham. Setidaknya jumlah komisaris independen dalam perusahaan adalah 30% dari seluruh anggota komisaris. Komisaris independen diukur dari persentase jumlah anggota komisaris dari luar perusahaan dari seluruh jumlah dewan komisaris (Rimardhani, 2016).

Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Independen dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Independen untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit merupakan salah satu bentuk perwujudan dari fungsi pengawasan yang lebih efektif diperlukan peran komite audit dalam melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan serta hasil audit internal maupun eksternal sehingga keberadaan sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerja keuangan (Adi & Suwarti, 2022).

Dalam hal penelitian yang dilakukan untuk menganalisis GCG hanya menggunakan indikator Dewan Komisaris Independen, dan komite Audit dikarenakan data laporan keuangan tidak lengkap.

2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan perusahaannya ditentukan dengan kinerja keuangan dimana perusahaan yang baik akan mentaati peraturan-peraturan yang ada baik peraturan pemerintah dan peraturan dari perusahaan dimana kinerja keuangan perusahaan ini dilakukan untuk meningkatkan laba perusahaan dan mengetahui sistem yang diterapkan perusahaan tersebut sudah berjalan dengan maksimal atau tidak. Kinerja keuangan menggambarkan hasil dari pengelolaan sumberdaya perusahaan yang dilakukan oleh manajemen

untuk menghasilkan keuntungan. Baik buruknya kinerja suatu perusahaan disebabkan oleh pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen yang menyangkut efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang ada.

Dalam sebuah perusahaan manajer biasanya menggunakan metode dalam menghitung atau menganalisis kinerja keuangannya dalam setiap kinerja memiliki metode perhitungan masing-masing dan dalam perusahaan manajer mengukur kinerja perusahaannya dengan menggunakan rasio untuk mengukur ukuran kinerja tersebut. Salah satunya adalah mengukur tingkat pengembalian aset dari laba perusahaan yaitu dengan Rasio *Return on Asset* (ROA). ROA diyakini sebagai indikator penting yang sering digunakan oleh pemilik saham, kreditor dan investor untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan dengan meninjau seberapa baik perusahaan mampu mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba bersih perusahaan tinggi maka tingkat pengembalian aset terhadap labanya pun tinggi atau baik (Kurniawati, 2019).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Kinerja Keuangan

Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk mencari keuntungan yang maksimal bagi perusahaannya. Jika perusahaan dapat dinilai memiliki kinerja perusahaan yang baik. Di lain pihak, perusahaan yang tidak dapat mencapai tujuannya perlu untuk menganalisa bagaimana kinerja perusahaan tersebut sehingga dapat mengupayakan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk membuat kinerja perusahaan menjadi semakin baik (Hutabarat, 2020).

Analisa kinerja perusahaan dirasakan penting tidak hanya untuk perusahaan itu sendiri melainkan bagi berbagai *stakeholders* perusahaan. Bagi perusahaan public, perusahaan yang tidak memiliki kinerja yang baik dapat mempengaruhi pemikiran pasar saham dan para pemegang saham untuk membeli atau melepas kepemilikan saham perusahaan (Hutabarat, 2020).

Manajer keuangan setiap perusahaan perlu memastikan apakah perusahaan mempunyai kinerja yang baik atau tidak bahkan apakah perusahaan itu sehat atau malah berpotensi bangkrut. Seperti seorang guru yang mencoba mengerti bagaimana sifat dan perilaku murid-muridnya dikelas, begitu juga dengan seorang manajer keuangan atau pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan kondisi keuangan atau pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan kondisi keuangan perusahaan. Untuk menilai perusahaan punya kualitas yang baik maka dapat dilihat dari kinerja keuangan (*financial performance*) dan kinerja non keuangan (*non financial performance*). Kinerja keuangan itu tercermin pada laporan keuangan yang menjadi penilaian *financial performance* perusahaan tersebut (Hutabarat, 2020).

a. Pengertian kinerja keuangan

Kinerja juga merupakan hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah selesai dilakukan, hasil pekerjaan itu dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan bersama pengukuran secara periodic (Hutabarat, 2020).

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Hutabarat, 2020).

Menurut Yunanto Adi Kusumo menyatakan bahwa kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu tahun tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana nya. Menurut Yuliorniati menyatakan bahwa kinerja keuangan sebagai suatu prospek atau masa depan, pertumbuhan dan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan. kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan bank dari masa lalu dan sebagai prospek masa depan baik itu peningkatan ataupun penurunan. (Syaifullah, Muhammad, 2020)

b. Pengukuran kinerja keuangan

Perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang mempunyai fungsi menjadi alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan.

Selain itu analisa rasio keuangan adalah aktivitas untuk menganalisa laporan keuangan dengan cara membandingkan akun-akun yang ada dalam laporan keuangan huna melihat hubungan dan perbandingan antara jumlah akun-akun yang dilaporan keuangan.

Secara umum analisa rasio keuangan adalah bagian dari analisa keuangan, dimana perusahaan dapat mempelajari perubahan yang terjadi dan dapat menentukan kenaikan atau penurunan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu (Hutabarat, 2020).

1) Rasio Likuiditas

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek yang berupa hutang-hutang jangka pendek. Rumus-rumus rasio likuiditas meliputi:

$$a) \text{ Current Ratio (Rasio Lancar)} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

$$b) \text{ Quick Ratio (Rasio Cepat)} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}}$$

$$c) \text{ Cash Ratio (Rasio Lambat)} = \frac{\text{Cash} + \text{Efek}}{\text{Hutang Lancar}}$$

$$d) \text{ Working Capital to Total Asset Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Utang Lancar}}{\text{Total Aktiva}}$$

Secara umum rasio likuiditas yang baik adalah memiliki nilai melebihi hutang lancarnya atau dengan demikian > 1 . Dengan memiliki kemampuan likuiditas > 1 maka dapat dinilai kewajiban keuangan jangka pendek yang berupa hutang-hutang jangka pendek (Hutabarat, 2020).

2) Rasio Solvabilitas

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang berupa hutang-hutang. Rumus-rumus rasio solvabilitas meliputi:

$$a) \text{ Total Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}}$$

$$b) \text{ Total Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}}$$

$$c) \text{ Long Term Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{hutang jangka panjang}}{\text{modal saham}}$$

$$d) \text{ tangibleAssets Debt Coverage} = \frac{\text{jumlah aktiva-intangible-hutang lancar}}{\text{hutang jangka panjang}}$$

$$e) \text{ times Interest Earned Ratio} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Hutang Jangka Panjang}}$$

Secara umum rasio solvabilitas yang baik adalah memiliki nilai lebih kecil dari nilai asetnya untuk DAR dan ekuitas DER. Pemerintah memberikan batasan 4:1 untuk rasio *debt to equity ratio*

pada tahun 2016. Sedangkan secara umum *rasio debt to asset* memiliki standar 30%. Dengan memiliki nilai solvabilitas dibawah standar tersebut maka dapat dinilai bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban keuangan yang berupa hutang-hutang (Hutabarat, 2020).

3) Rasio Aktivitas

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola aset perusahaan. Rumus-rumus rasio aktivitas meliputi:

$$a) \text{ Total Assets Turnover} = \frac{\text{penjualan bersih}}{\text{total aktiva}}$$

$$b) \text{ Receivable Turnover} = \frac{\text{penjualan kredit}}{\text{piutang rata-rata}}$$

$$c) \text{ Average Collection Period} = \frac{\text{piutang rata-rata} \times 360}{\text{penjualan kredit}}$$

$$d) \text{ Inventory Turnover} = \frac{\text{harga pokok produk}}{\text{inventory rata-rata}}$$

$$e) \text{ Working Capital Turnover} = \frac{\text{penjualan Neto}}{\text{Aktiva Lancar} - \text{Hutang Lancar}}$$

$$f) \text{ Average Days Inventory} = \frac{\text{inventory rata-rata} \times 360}{\text{harga Pokok produk}}$$

Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. Secara umum rasio aktivitas yang baik jika terdapat keseimbangan yang layak antara penjualan dan beragam unsur aktiva misalnya persediaan, aktiva tetap dan aktiva lainnya. Misalnya *total asset turn over* merupakan rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan tertentu. Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva (Hutabarat, 2020).

4) Rasio Profitabilitas

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi menghasilkan laba. Rumus-rumus rasio profitabilitas meliputi:

$$a) \text{ Gross Profit Margin (Margin Laba Kotor)} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

$$b) \text{ Net Profit Margin (margin Laba Bersih)} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

$$c) \text{ Earning Power of Total Investment (rate of Return on Net Worth)} \\ = \frac{\text{Laba Setelah Bunga dan Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

$$d) \text{ Rate or Return For The Owners (rate of Return on Total Assrts /} \\ \text{ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}}$$

$$e) \text{ Operating Income Ratio or Operating Profit Margin} = \\ \frac{(\text{Penjualan Neto} - \text{HPP} - \text{Biaya ADM, Penjualan, Umum})}{\text{Penjualan Neto}}$$

$$f) \text{ Operating Ratio} = \frac{(\text{HPP} = \text{Biaya ADM, Penjualan, Umum})}{\text{Penjualan Neto}}$$

$$g) \text{ Net Earning Power Ratio (Rate or Return on Investment)} = \\ \frac{\text{Laba Neto Sesudah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

Secara umum rasio profitabilitas yang baik adalah memiliki nilai lebih besar dari nilai asetnya untuk ROA dan ekuitas untuk ROE. Secara umum rasio *return on asset* memiliki standar 5% dan *return on equity* sebesar 20%. Dengan memiliki nilai profitabilitas diatas standar tersebut maka dapat dinilai bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba perusahaan berdasarkan aset dan ekuitas yang dimiliki (Hutabarat, 2020).

c. Tujuan kinerja keuangan

Ada beberapa tujuan penilaian kinerja perusahaan, yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas.

Dengan mengetahui hal ini maka dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

- 2) Untuk mengetahui tingkat likuiditas

Dengan mengetahui hal ini maka dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih

- 3) Untuk mengetahui tingkat solvabilitas

Dengan mengetahui hal ini dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.

- 4) Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha

Dengan mengetahui hal ini dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan (Hutabarat, 2020).

d. Teori faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan

Faktor-faktor kinerja keuangan perusahaan menurut Jones (2004:115) dalam Zeandrato (2021) adalah sebagai berikut:

- 1) Resiko, yang mampu menunjukkan keuntungan atau *return* yang didapat oleh investor tidak terlepas dari risiko yang melekat pada setiap perusahaan. Risiko adalah kemungkinan *realized return* suatu

investasi akan berbeda dengan *expected return* investasi tersebut. *Realized return* adalah total penerimaan oleh sebuah saham yaitu semua penerimaan kas yang diterima ditambah dengan perubahan harga saham yang terjadi pada suatu periode waktu tertentu yang diharapkan dapat diterima oleh investor. Nilai ekspektasi ini dihitung dengan melakukan pembobotan rata-rata dari semua penerimaan yang mungkin terjadi, dimana setiap penerimaan dibobotkan dengan profitabilitas.

- 2) Ukuran perusahaan, ukuran perusahaan (*firm size*) adalah salah satu kriteria yang dipertimbangkan oleh investor dalam strategi berinvestasi. Ukuran perusahaan dapat digunakan sebagai alat bantu mengukur besar kecilnya perusahaan. Indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran perusahaan adalah total penjualan, total aktiva, jumlah karyawan, *value added*, kapitalisasi nilai pasar, dan berbagai parameter lainnya.
- 3) Struktur modal juga merupakan salah satu aspek yang berhubungan langsung dengan kinerja keuangan perusahaan satu perusahaan. Salah satu keputusan yang paling penting yang dihadapi manajer keuangan dengan kaitannya dengan operasi perusahaan adalah keputusan pendanaan. Perusahaan dapat didanai dengan utang dan ekuitas, utang (*debt*) yang dimaksud adalah utang untuk pendanaan perusahaan, tidak selalu sama sifatnya dengan kewajiban (*liabilities*) dan tidak sama dengan tagihan (*payable*) (Zendrato et al., 2021).

2. Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan-tujuan ekonomi dan tujuan-tujuan sosial, serta antara tujuan-tujuan individu dan tujuan-tujuan masyarakat. Sasaran pelaksanaan GCG adalah untuk menyelaraskan kepentingan pribadi, perusahaan dan masyarakat. Tantangan dalam penerapan GCG adalah mencari cara untuk memaksimalkan penciptaan kesejahteraan sedemikian rupa, sehingga tidak memberikan beban biaya yang tidak

patut kepada pihak ketiga atau masyarakat luas (Dr. A. Junaedi, S.H., 2020).

Sebagai sebuah konsep, GCG ternyata tak memiliki definisi tunggal. Menurut Komite Cadbury dalam buku Dr. A. Junaedi, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan sebagai upaya pengaturan kewenangan direktur, manajer, pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu (Dr. A. Junaedi, S.H., 2020).

Perkembangan konsep *corporate governance* sesungguhnya telah dimulai jauh sebelum isu *corporate governance* jadi kosakata paling hangat di kalangan para eksekutif bisnis. Bersama dengan dikembangkannya sistem korporasi di Inggris, Eropa dan Amerika Serikat sekitar satu setengah abad lalu (1840-an), isu *corporate* telah muncul ke permukaan, meskipun baru berupa saran (*exhortation*) dan anekdot. Istilah "*corporate governance*" itu sendiri untuk pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury committee* di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang sangat menentukan bagi praktik *Corporate Governance* di seluruh dunia. *Cadbury report* mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi (Candra, 2021).

Good Corporate Governance adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham. (*stakeholders*) serta mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas (Candra, 2021).

a. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah menetapkan *good corporate governance* sebagai kewajiban semua bank syariah dan unit usaha syariah. Undang-undang menjelaskan *good corporate governance* sebagai tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usaha. Undang-undang juga mewajibkan bank yang bersangkutan untuk menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut.

Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/ 2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menjelaskan sebagai berikut:

- 1) *Transparansi (transparency)* ialah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
- 2) *Akuntabilitas (accountability)* ialah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- 3) *Pertanggungjawaban (responsibility)* ialah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- 4) *Profesional (profesional)* ialah memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
- 5) *Kewajaran* adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PBI No. 8/4 /PBI/2006 Jo. PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, Bank Syariah, dan UUS

mewajibkan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menerapkan GCG dalam setiap kegiatan usahanya (termasuk dalam penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksana kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal) pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, namun dengan ruang lingkup yang berbeda antara BUS dan UUS. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip GCG minimal harus diwujudkan dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Independen dan direksi.
- 2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern.
- 3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- 4) Pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit eksternal.
- 5) Batas maksimal pelayanan dana.
- 6) Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan BUS. (Sadi Is, 2022)

b. Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan pokok *good corporate governance* adalah tercapainya kondisi pemerintahan atau perusahaan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan public secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak atau *stakeholders* (Syofyan, 2021).

Tujuan *good corporate governance*, menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai berikut:

- 1) Mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran.
- 2) Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi dan rapat umum pemegang saham. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris Independen dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan.

- 3) Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. Mengoptimalkan lingkungan terutama di sekitar perusahaan. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- 4) Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan (Badawi & Hartati, 2024).

Dengan demikian, penerapan pelaksanaan prinsip GCG secara optimal akan mampu mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang ada, dan pada gilirannya memberikan *value creation* semua pihak yang terkait dengan perusahaan. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) telah mengembangkan “*The OECD Principles of Corporate Governance*” pada bulan April 1998. Hal ini mengingat bahwa prinsip ini disusun untuk digunakan sebagai referensi di berbagai negara yang mempunyai karakteristik sistem hukum, budaya, dan lingkungan yang berbeda. Dengan demikian, prinsip yang universal tersebut akan menjadi pedoman untuk semua negara atau perusahaan namun diselaraskan dengan sistem hukum, aturan, atau nilai yang berlaku di negara masing-masing (Badawi & Hartati, 2024).

c. Manfaat *Good Corporate Governance*

Terdapat beberapa aspek penting dari *Good Corporate Governance* yang perlu dipahami beragam kalangan bisnis, yakni:

- 1) Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan di antaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris, dan direksi. Keseimbangan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut (keseimbangan internal).

- 2) Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholders*. Tanggung jawab ini meliputi hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholders* (keseimbangan eksternal). Di antaranya, tanggung jawab pengelola/pengurus perusahaan, manajemen, pengawasan, serta pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.
- 3) Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian hal berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya.
- 4) Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam (*insider information for insider trading*) (Junaedi, 2020).

Manfaat *good corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *shareholders* dan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Untuk meningkatkan akuntabilitas, antara lain diperlukan: auditor, komite audit, serta remunerasi eksekutif. GCG memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme *checks and balances* di perusahaan (Junaedi, 2020).

Di samping hal-hal tersebut, menurut pendapat Daniri, GCG juga dapat:

- 1) Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
- 2) Mengurangi biaya modal, yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
- 3) Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada public luas dalam jangka panjang
- 4) Menciptakan dukungan para *stakeholders* (para pihak yang berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

Manfaat GCG ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global (Junaedi, 2020).

d. Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme *good corporate governance* pada penelitian ini meliputi kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit:

1) Kepemilikan Manajerial

Menurut (Sudana, 2015) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris. Kepemilikan manajerial sangat

bermanfaat dimana manajer ikut ambil bagian dari kepemilikan saham perusahaan. Manajer kemudian akan berusaha lebih baik untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga ia pun akan menikmati sebagai keuntungan bagiannya tersebut. Semakin besar kepemilikan nilai perusahaan sehingga ia pun akan menikmati sebagai keuntungan bagiannya tersebut. Semakin besar kepemilikan saham oleh manajerial, maka pihak manajerial akan bekerja lebih proaktif dalam mewujudkan kepentingan pemegang saham dan akhirnya akan meningkatkan kepercayaan, kemudian nilai perusahaan juga akan meningkat.

Kepemilikan manajerial merupakan keadaan dimana manajer mempunyai saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini dapat dilihat dari besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Adanya kepemilikan manajerial akan sangat berkaitan dengan *agency theory*.

Dalam *agency theory*, hubungan antara manajer dan pemegang saham digambarkan sebagai hubungan antara *agent* dan *principal*. Manajer sebagai *agent* dipercaya oleh pemegang saham yang bertindak sebagai *principal* untuk menjalankan perusahaan dan memaksimalkan sumber daya agar tujuan perusahaan tercapai. Masalah dasar dalam *agency theory* adalah timbulnya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Manajer memiliki resiko untuk tidak dipilih lagi sebagai manajer jika gagal menjalankan fungsinya, sementara pemegang saham memiliki resiko kehilangan modalnya jika salah memilih manajer.

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah Saham Manajerial}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

2) Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Dewan

Komisaris Independen adalah dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota komisaris lain, pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang bisa mempengaruhi tugasnya untuk bertindak independen. Anggota komisaris diharapkan memiliki watak yang amanah dan mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Dengan semakin besarnya komposisi dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka diharapkan tingkat independensi dalam pengendalian terhadap manajemen semakin objektif. Pembentukan dewan komisaris independen merupakan salah satu pilar penerapan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima retur atas dana yang telah mereka investasikan. *Good corporate governance* sangat berhubungan dengan bagaimana meyakinkan para investor bahwa manajer akan menjalankan tugas-tugasnya dengan benar dan memberikan keuntungan kepada mereka. Investor yakin bahwa manajer tidak akan menggelapkan dana yang mereka investasikan ke dalam proyek proyek yang tidak menguntungkan. Penerapan *good corporate governance* diharapkan memberikan keuntungan bagi *shareholder*, *stakeholders* dan masyarakat lebih luas serta berfokus pada nilai tambah dalam jangka panjang. Keberhasilan pelaksanaan *good corporate governance* sangat ditentukan oleh kualitas pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen (Azis & Hartono, 2017).

Teori *agency* juga mengidentifikasi bahwa dewan komisaris dapat menjadi alat monitoring alternatif yang membantu mengendalikan masalah agensi perusahaan, yaitu dengan mengatur keputusan-keputusan yang dibuat manajemen dan menilai dampaknya terhadap hak-hak pemegang saham. Di dalam FCGI

(2006) disebut beberapa peranan penting dewan komisaris independen dijelaskan antara lain :

- a) Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan.
- b) Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota direksi.
- c) Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris.
- d) Memonitor pelaksanaan governance.
- e) Membantu proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan (Utomo, 2019).

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}}$$

3) Komite Audit

komite audit adalah komite tertentu yang membantu tugas pengawasan dewan komisaris dalam pengelolaan perusahaan, salah satunya pengawasan dalam hal pelaporan keuangan perusahaan (Azis & Hartono, 2017). Komite audit mempunyai peran yang penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan, menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*. Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen dan memiliki anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar perusahaan publik. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Independen, sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris, sehingga komite audit bertanggung jawab terhadap dewan komisaris. Komite audit bertugas untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam

melaksanakan pelaksanaan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya komite audit ini memiliki kewenangan dan fasilitas untuk mengakses data perusahaan. Komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen, independensi komite audit tidak dapat dipisahkan dengan moralitas yang melandasi integrasinya. Hal ini perlu disadari karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor (Hasnatati, 2014).

Komite audit dalam penelitian ini dihitung dengan mengacu pada penelitian (Azis & Hartono, 2017) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \text{Total Angka Jumlah Komite Audit}$$

e. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam perbankan syariah

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) PBI No. 11/33/PB1/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, disebutkan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pelaksanaan prinsip-prinsip

Oleh sebuah bank dibagi dalam dua golongan, yakni BUS dan UUS. Dalam pelaksanaan GCG bagi BUS paling tidak harus diwujudkan dalam:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi
- 2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern BUS
- 3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
- 4) Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit eksternal.
- 5) Batas maksimum penyaluran dana, dan

6) Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan BUS (Umam, 2015).

Selanjutnya, pelaksanaan GCG bagi Unit Usaha Syariah paling tidak harus diwujudkan dalam:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS:
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
- 3) Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti, dan
- 4) Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan UUS (Umam, 2015)

Sebelum diundangkannya PBI No. 11/33/PB1/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, ada beberapa prinsip GCG yang diharapkan diterapkan di dunia perbankan, yaitu prinsip-prinsip sebagaimana yang diatur dalam PBI No 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan bank oleh badan hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan, yang wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penyetoran modal untuk pendirian bank atau pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penambahan modal disetor bank.
- 2) Pemegang saham pengendali wajib memenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya (*comfort letter*).
- 3) Bilamana benturan kepentingan terjadi, anggota dewan komisaris, anggota direksi, pejabat eksekutif dan pemimpin kantor cabang dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan bank (dalam hal ini termasuk mengurangi keuntungan bank) dan wajib

mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

- 4) Adanya larangan merangkap jabatan bagi anggota dewan Komisaris dan anggota direksi.
- 5) Mayoritas anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya lima tahun sebagai pejabat eksekutif pada bank dan dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk bersama dengan sesama anggota direksi atau anggota dewan komisaris, serta direktur utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.
- 6) Anggota direksi, baik secara sendiri sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain, dan
- 7) Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- 8) Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan kewajiban menyampaikan comfort letter, benturan kepentingan, larangan perangkapan jabatan komisaris dan larangan bagi direksi sebagaimana tersebut di atas, bank dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (Umam, 2015).

Corporate governance merupakan suatu konsepsi yang secara nil dijabarkan dalam bentuk ketentuan/peraturan yang dibuat oleh lembaga otoritas, norma-norma dan etika yang dikembangkan oleh asosiasi industri dan diadopsi oleh pelaku industri, serta lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas dan peran yang jelas untuk mendorong disiplin, mengatasi dampak moral hazard, dan melaksanakan fungsi check and balance. Sejumlah perangkat dasar

yang diperlukan untuk pembentukan GCG pada bank syariah antara lain:

- 1) Sistem pengendalian intern;
- 2) Manajemen risiko;
- 3) Ketentuan yang mengarah pada peningkatan keterbukaan informasi;
- 4) Sistem akuntansi,
- 5) Mekanisme jaminan kepatuhan syariah,
- 6) Audit ekstem

Keenam perangkat tersebut pada dasarnya berlaku bagi semua bank baik bank konvensional maupun bank syariah. Adapun yang membedakannya adalah bahwa di bank syariah, perlu adanya perangkat yang dapat menjamin kepatuhan kepada nilai-nilai dan aturan syariah. Hal demikian tidak dijumpai dalam sistem perbankan konvensional (Umam, 2015).

Khusus untuk meningkatkan pemenuhan prinsip syariah oleh bank paling tidak terdapat dua langkah penting yang perlu ditempuh:

- 1) Perlunya mengefektifkan aturan dan mekanisme pengakuan (*endorsement*) dari otoritas fatwa dalam hal ini DSN-MUI dalam hal menentukan kehalalan atau kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah
- 2) Perlunya mengefektifkan sistem pengawasan yang memantau transaksi keuangan bank sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas fatwa perbankan. Terkait dengan hal ini, permasalahan yang sering muncul adalah masih minimnya ahli yang memiliki pemahaman ilmu fiqh dan syariah serta sekaligus memiliki pengetahuan perbankan yang memadai (Umam, 2015).

3. Hubungan *Good Corporate Governance* terhadap ROA

Good Corporate governance adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*). Penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menghambat aktivitas

rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Menurut Dani dan Hasan (2005), factor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan antara lain *Good Corporate Governance* (GCG). Karena prinsip-prinsip dasar dari GCG pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Semakin baik *corporate governance* yang dimiliki suatu perusahaan maka diharapkan semakin baik pula kinerja dari suatu perusahaan tersebut. *Good Corporate Governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham, dan *stakeholders* lainnya (Suryanto & Refianto, 2019).

B. Penelitian Yang Relevan

1. Hania Febrina dan Kurnia (2021) meneliti “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah”

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, komite audit dan *Capital adequacy ratio* ini tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Sedangkan, perbedaan penulis dengan peneliti yaitu, pada tahap ini penulis membahas tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di bursa efek Indonesia sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang pengaruh *good corporate governance* dan

capital adequacy ratio terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah (Hania Pebriana, 2021).

2. Eki Candra. SE.MM (2021) meneliti “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah (Studi Kasus Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Di Indonesia Periode 2015-2019”

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh praktek GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Praktek GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA) pada perusahaan yang terdaftar di BEI dengan nilai signifikansi $0,037 < \alpha 0,05$, (2) Praktek GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (NPM) pada perusahaan yang terdaftar di BEI dengan nilai signifikansi $0,011 < \alpha 0,05$.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan bank syariah. Sedangkan, perbedaan penulis dengan peneliti yaitu, pada tahap ini penulis membahas tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di bursa efek Indonesia sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan bank syariah (studi kasus unit usaha syariah bank pembangunan daerah di Indonesia periode 2015-2019 (Candra, 2021).

3. Mayla Handyan (2021) meneliti “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good*

corporate governance berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Sedangkan secara parsial, kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan, kemudian kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan. Sedangkan, perbedaan penulis dengan peneliti yaitu, pada tahap ini penulis membahas tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di bursa efek Indonesia sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan (Hadyan, 2021).

4. Henli Yoel Honi,dkk (2020) meneliti “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Tahun 2014-2018”

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penerapan *good corporate governance* (Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional tahun 2014-2018. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian uji secara parsial menunjukkan bahwa Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan, Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan, Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan dan Komite Pemantau Risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Dan uji simultan menunjukkan bahwa Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko secara bersama sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

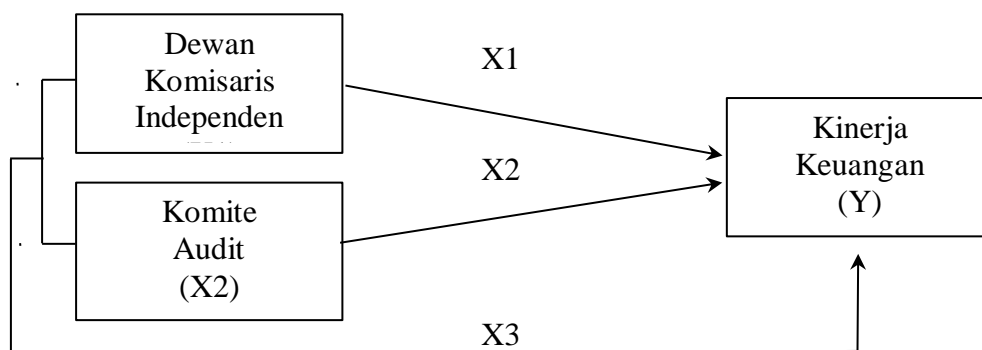
Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan. Sedangkan, perbedaan penulis dengan peneliti yaitu, pada tahap ini penulis membahas tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di bursa efek Indonesia sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan bank Umum Konvensional Tahun 2014-2018 (Honi et al., 2020).

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian kuantitatif adalah sebuah model atau representasi konseptual yang menggambarkan bagaimana variabel-variabel dalam penelitian saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Kerangka berpikir ini berfungsi sebagai peta visual yang mengarahkan peneliti dalam merancang penelitian, menyusun hipotesis, dan menganalisis data. Dengan menyusun kerangka berpikir, peneliti dapat dengan jelas menunjukkan hubungan sebab-akibat antara variabel yang diteliti, serta mengidentifikasi variabel independen, dependen, *moderating*, dan *mediating* yang terlibat (Abdillah, Leon A, 2024).

Dalam penelitian kuantitatif, menurut Yusuf dan Khasanah (2019) kerangka berpikir juga berfungsi untuk mempermudah interpretasi hasil penelitian. Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, kerangka berpikir memungkinkan peneliti untuk mengaitkan hasil temuan dengan teori yang ada dan menjelaskan bagaimana variabel-variabel tersebut saling berinteraksi. Ini membantu dalam menilai apakah hipotesis yang diajukan didukung oleh data dan bagaimana temuan tersebut berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang fenomena yang diteliti (Abdillah, Leon A, 2024).

Untuk melihat keterkaitan antar variabel dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Hipotesis merupakan saran penelitian ilmiah karena hipotesis adalah instrument kerja dari suatu teori dan bersifat spesifik yang siap diuji secara empiris. Dalam merumuskan hipotesis pernyataan harus merupakan pencerminan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis yang bersifat relasional ataupun deskriptif disebut hipotesis kerja, sedang untuk pengujian statistic dibutuhkan hipotesis pembanding hipotesis kerja. Hipotesis semacam itu disebut hipotesis nol (Priadana, Sidik dan Sunarsi, 2021).

Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. H_{01} : Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di bursa efek Indonesia
 H_{a1} : Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di bursa efek Indonesia
2. H_{02} : Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di bursa efek Indonesia

*Ha*₂: Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di bursa efek Indonesia

3. *H*₀₃: Dewan Komisaris, Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di bursa efek Indonesia

*Ha*₃: Dewan Komisaris, Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di bursa efek Indonesia

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan antara dua variabel atau lebih dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia . jenis data digunakan adalah data panel yaitu, gabungan data *time series* dan *cross section* yang mencakup beberapa bank syariah selama periode 2019 sampai dengan 2023.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian berkeinginan untuk mengetahui tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui website www.idx.co.id. Untuk mempermudah kegiatan penelitian, penulis membuat *time schedule* sebagai berikut:

**Tabel 3. 1
Jadwal Kegiatan Penulisan Skripsi**

Kegiatan	Tahun 2025						
	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus
Pengajuan judul proposal skripsi							
Bimbingan proposal skripsi							
Seminar proposal skripsi							
Perbaikan setelah seminar proposal							

Pengumpulan data							
Bimbingan skripsi							
Munaqasah							

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa laporan keuangan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019-2023. Dilanjutkan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan variabel *Good Corporate Governance* dan kinerja keuangan yang bersumber dari laporan keuangan masing-masing bank syariah, laporan hasil *self assessment good corporate governance (GCG)*, situs resmi bursa efek Indonesia dan situs resmi masing-masing bank syariah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dan dokumentasi. Menurut Zuriah (2009), dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Pane, 2022).

Dokumen adalah proses mengevaluasi dokumen yang ada untuk mengumpulkan data numerik yang dapat digunakan untuk lebih memahami peristiwa dan membuat keputusan yang tepat. Tinjauan dokumen meliputi evaluasi dokumen dan catatan yang ada untuk memperoleh informasi kuantitatif. Strategi ini dapat melibatkan catatan public, dokumen pribadi, dan bukti fisik (Abdillah, Leon A, 2024).

Dalam hal penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi artinya diambil dari dokumen-dokumen keuangan bank syariah yang terdaftar di BEI.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam rangka memecahkan masalah atau menguji hipotesis.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistic deskriptif dengan metode analisis regresi data panel menggunakan uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi), analisis regresi data panel, dan uji hipotesis (uji T, uji F, dan uji R Square). Kemudian data diolah menggunakan software statistic Eviews 13 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah proses meringkas dan mendeskripsikan fakta secara terperinci. Pendekatan ini membantu dalam menganalisis kualitas data dan menemukan pola atau tren. Misalnya, dalam sebuah penelitian tentang mengidentifikasi motivasi belajar siswa dalam menulis skripsi (Sani, 2016), analisis deskriptif digunakan untuk memeriksa data yang diterima dari siswa dan lebih memahami motivasi mereka (Abdillah, Leon A, 2024).

Menurut Sugiyono (2004) analisis deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Jadi dapat dijelaskan bahwa statistic deskriptif adalah bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami (Purnomo, 2017).

2. Regresi Data Panel

a. Pengujian analisis data panel

1) Uji *chow*

Metode pengujian pertama dalam pemilihan model yang paling tepat untuk mengelola data panel pada penelitian ini adalah uji *Chow*. Uji *Chow* atau dapat disebut juga uji statistik F yang

berguna untuk mengetahui apakah metode *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik dibandingkan metode *Common Effect Model* (CEM) atau *Pooled Least Square* (PLS) yang dapat dilakukan dengan melihat signifikansi metode FEM dengan uji statistik F. Hipotesis nol (H_2) yang digunakan adalah *intercept* dan *slope* adalah sama.

Kriteria penilaian uji *chow* muncul berdasarkan hasil *f-test* maupun *chi-square*. Kriteria penilaian uji *chow* dapat dilihat dari nilai *statistic cross-section F*, nilai *statistic Cross-section Chi-square*, nilai *Prob. Cross Section F* dan nilai *Prob. Cross-section Chi-Square*. Berdasarkan kriteria tersebut maka dapat dilihat asumsi-asumsi yang dapat digunakan pada hasil *Uji Chow (Chow Test)* yang ada pada berikut ini:

- a) Apabila nilai *Statistic Cross-section F* lebih kecil dari *F-tabel* (*Statistic Cross-section F* < *F-tabel*) dan nilai *Prob. Cross-section F* lebih besar dari taraf signifikansi standar sebagai *standard error* yang digunakan yaitu sebesar 0,05 (*Prob. Cross-section F* > *Prob.0,05*) maka hasil pemilihan metode estimasi model pada *Uji Chow (Chow Test)* adalah *Common Effect Model* (CEM).
- b) Apabila nilai *Statistic Cross-section Chi-Square* lebih kecil dari *Chi-Square-tabel* (*Statistic Cross-section Chi-Square* < *Chi-Square-tabel*) dan nilai *Prob. Cross-section Chi-Square* lebih besar dari taraf signifikansi standar sebagai *standard error* yang digunakan yaitu sebesar 0.05 (*prob.cross-section F* > *prob. 0.05*) maka hasil pemilihan metode estimasi model pada uji *chow (chow test)* adalah *Common Effect Model* (CEM).
- c) Apabila nilai *Statistic Cross-section F* lebih besar dari *F-tabel* (*Statistic Cross-section F* > *F-tabel*) dan nilai *Prob. Cross-section F* lebih kecil dari taraf signifikansi standar sebagai *standard error* yang digunakan yaitu sebesar 0,05 (*Prob. Cross-section F* < *Prob*

0,05) maka hasil pemilihan metode estimasi model pada Uji Chow (Chow Test) adalah Fixed Effect Model (FEM).

- d) Apabila nilai Statistic Cross-section Chi-Square lebih besar dari Chi-Square-tabel ($\text{Statistic Cross-section Chi-Square} > \text{Chi-Square-tabel}$) dan nilai Prob. Cross-section Chi-Square lebih kecil dari taraf signifikansi standar sebagai standard error yang digunakan yaitu sebesar 0,05 ($\text{Prob. Cross-section Chi-Square} < \text{Prob } 0,05$) maka hasil pemilihan metode estimasi model pada Uji Chow (Chow Test) adalah *Fixed Effect Model* (FEM) (Rifkhan, 2023)

Berdasarkan kriteria dan asumsi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penentuan hipotesisnya sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model* (CEM) atau *Pooled Least Square* (PLS)

H_a : *Fixed Effect Model* (FEM)

Berdasarkan kriteria, asumsi, dan penentuan hipotesisnya maka apabila hasil nilai Statistic Cross-section F lebih kecil dari F-tabel ($\text{Statistic Cross-section F} < \text{F-tabel}$) dan nilai Prob Cross-section F lebih besar dari taraf signifikansi standar sebagai standard error yang digunakan yaitu sebesar 0,05 ($\text{Prob Cross-section F} > \text{Prob.0.05}$) atau apabila hasil nilai Statistic Cross-section Chi-Square lebih kecil dari Chi-Square-tabel ($\text{Statistic Cross-section Chi-Square} < \text{Chi-Square-tabel}$) dan nilai Prob Cross-section Chi-Square lebih besar dari taraf signifikansi standar sebagai standard error yang digunakan yaitu sebesar 0,05 ($\text{Prob. Cross-section Chi-Square} > \text{Prob.0,05}$) maka H_0 di terima dan H_a di tolak, hal tersebut berarti model yang digunakan adalah Common Effect Model (CEM).

Apabila hasil nilai Statistic Cross-section F lebih besar dari F-tabel ($\text{Statistic Cross-section F} > \text{F-tabel}$) dan nilai Prob Cross-section F lebih kecil dari taraf signifikansi standar sebagai standard error yang digunakan yaitu sebesar 0,05 ($\text{Prob Cross-section F} <$

Prob 0,05) atau apabila hasil nilai Statistic Cross-section Chi-Square lebih besar dari Chi-Square-tabel (Statistic Cross-section Chi-Square > CRSquare-tabel) dan nilai Prob Cross-section Chi-Square lebih kecil dari taraf signifikansi standar sebagai standard error yang digunakan yaitu sebesar 0,05 (Prob. Cross-section Chi-Square < Prob 0,05) maka H_0 di tolak dan H_1 di terima, hal tersebut berarti model yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM)

Apabila seandainya hasil uji Chow memilih Fixed Effect Model (FEM), maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian dengan uji Hausman untuk memilih antara Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM) sebagai model terbaik, namun jika hasil uji Chow ternyata memilih Common Effect Model (CEM), maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan pengujian Lagrangian Multiplier Test (LM). (Rifkhan, 2023)

2) Uji Hausman

Pengujian Hausman merupakan pengujian yang paling umum untuk membandingkan estimator model efek tetap (fixed effects/FE) dengan model efek acak (random effects/RE)', yaitu dengan menguji apakah error term dari efek khusus (unobserved heterogeneity effect) memiliki korelasi dengan prediktor Hipotesis pengujian Hausman adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada korelasi unobserved heterogeneity effect dengan prediktor

H_a : Terdapat korelasi unobserved heterogeneity effect dengan prediktor

Jika hasil pengujian Hausman signifikan secara statistik, maka pemilihan model yang sesuai adalah model FE ketimbang model RE. Sebaliknya jika hasil pengujian tidak signifikan, maka hal ini berarti tidak dapat menolak H_0 yang menyatakan bahwa tidak ada korelasi dari unobserved heterogeneity dengan prediktor.

Dengan demikian maka hasil pengujian menyatakan bahwa model RE lebih sesuai digunakan dibandingkan dengan model FE (Herusetya, 2025).

3) Uji *Lagrangian Multiplier*

Metode pengujian ketiga atau metode pengujian terakhir dalam pemilihan model yang paling tepat untuk mengelola data panel adalah uji Lagrange Multiplier (LM) yang digunakan untuk membandingkan atau memilih model yang terbaik antara metode Common Effect Model (CEM) atau Pooled Least Square (PLS) dengan metode Random Effect Model (REM). Pengujian ini didasarkan pada distribusi Chi-Squares dengan derajat kebebasan (df) sebesar jumlah variabel bebas. Pengujian LM dikembangkan oleh Breusch-Pagan (Rifkhan, 2023).

Metode perhitungan uji Lagrange Multiplier (LM) yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode Breusch-Pagan. Metode Breusch-Pagan merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh para peneliti dalam perhitungan uji LM (Rifkhan, 2023).

Adapun penilaian kriteria-kriteria yang dapat digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji Lagrange Multiplier (LM) berdasarkan metode Breusch-Pagan dapat dilihat dari nilai Cross-section Breusch-Pagan. Berdasarkan kriteria tersebut maka dapat dilihat asumsi-asumsi yang dapat digunakan pada hasil Uji Lagrange Multiplier (LM) yang ada pada berikut ini:

- a) Apabila nilai Cross-section Breusch-Pagan lebih besar dari taraf signifikansi standar sebagai standard error yang digunakan yaitu sebesar 0,05 ($\text{Cross-section Breusch-Pagan} > \text{Prob } 0,05$) maka hasil pemilihan metode estimasi model pada Uji Lagrange Multiplier (LM) adalah Common Effect Model (CEM).
- b) Apabila nilai Cross-section Breusch-Pagan lebih kecil dari taraf signifikansi standar sebagai standard error yang digunakan yaitu sebesar 0,05 ($\text{Cross-section Breusch-Pagan} < \text{Prob } 0,05$) maka hasil

pemilihan metode estimasi model pada Uji Lagrange Multiplier (LM) adalah Random Effect Model /REM.

Berdasarkan kriteria dan asumsi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penentuan hipotesisnya sebagai berikut:

H_0 : Common Effect Model (CEM)

H_a :Random Effect Model (REM)

Berdasarkan kriteria, asumsi, dan penentuan hipotesisnya maka apabila hasil nilai Cross-section Breusch-Pagan lebih besar dari taraf signifikansi standar sebagai standard error yang digunakan yaitu sebesar 0,05 (Cross-section Breusch-Pagan Prob 0,05) maka H_0 di terima dan H_a di tolak, hal tersebut berarti model yang digunakan adalah Common Effect Model (REM) (Rifkhan, 2023).

3. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi asumsi-asumsi dasar. Pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi

a. Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2016) uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Asumsi yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Jika asumsi dilanggar maka uji statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Jarque-Bera dilakukan untuk menguji apakah residual pada model regresi mengikuti distribusi normal. Pengujian ini penting karena salah satu asumsi dasar dalam regresi linear klasik adalah normalitas residual.

Metode ini didasarkan pada pengukuran nilai *skewness* (kemiringan distribusi) dan kurtosis (tingkat kepekaan distribusi terhadap outlier). Jika nilai probabilitas (p-value) lebih besar dari 0,05,

maka residual dianggap berdistribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas memiliki masalah multi korelasi atau tidak. Menurut (Sachs dan Stern, 2017) Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF (*Varian Invalting Factor*) jika nilai VIF < 10 maka terhindar dari multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kondisi varians dari data harus sama pada seluruh pengamatan. Diharapkan pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga uji heteroskedastisitas pada penelitian ini diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya varians dari residual satu pengamatan lain yang tetap atau tidak tetap (Candra, 2021).

Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode *glejser* karena data dalam penelitian merupakan data keuangan maka kemungkinsn adanya fluktuasi error akibat perbedaan ukuran bank, tata kelola dan manajemen sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu uji *glejser* relevan untuk memastikan kestabilan varian error pada model.

Glejser menghasilkan beberapa ukuran statistic seperti F-Statistic, Obs*R-Squared dan Scale Explained Sum of Squares, yang masing-masing disertai nilai probabilitas sebagai dasar pengambilan keputusan. Kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $p\text{-value} > 0,05$ maka tidak ditemukan indikasi heteroskedastisitas, sehingga model dianggap memenuhi asumsi homokedastisitas.
- 2) Jika $p\text{-value} < 0,05$ maka terdapat gejala heterokedastisitas dalam model.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t sebelumnya pada model regresi linear yang dipergunakan. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Dalam model regresi yang baik adalah tidak terjadi autokorelasi (Nisfiannoor, 2009).

Menurut Santoso (2010) salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 ($DW < -2$)
- 2) Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan $+2$ atau $-2 < DW < +2$
- 3) Terjadi autokorelasi negatif jika DW diatas $+2$ atau $DW > +2$.

4. Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis adalah pendekatan statistic yang menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara data yang diamati dan diprediksi. Strategi ini membantu dalam mengevaluasi hipotesis penelitian dan menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Misalnya, dalam penelitian tentang efektifitas permainan anagram daring terhadap hasil belajar siswa (Zumaro, 2023) pengujian hipotesis digunakan untuk menilai dampak permainan anagram terhadap kinerja siswa (Abdillah, Leon A, 2024).

Hipotesis adalah pernyataan yang dapat diuji untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel. Hipotesis dikembangkan berdasarkan tinjauan literatur, teori, atau hasil penelitian sebelumnya dan

dirancang untuk dijawab melalui pengumpulan dan analisis data (Abdillah, Leon A, 2024).

a. Analisis regresi berganda

Analisis regresi berganda merupakan alat lain yang efektif dalam penelitian kuantitatif. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki hubungan antara beberapa faktor independen dan satu variabel dependen. Strategi ini membantu dalam menemukan predictor utama variabel dependen. Misalnya, dalam sebuah penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan untuk menggunakan *mobile banking* Bank Syariah Indonesia (Mustika and Puspita, 2020), analisis regresi berganda digunakan untuk memeriksa data dan menemukan elemen-elemen utamanya. Regresi linear berganda digunakan ketika ada lebih dari satu variabel independen (Abdillah, Leon A, 2024).

Regresi berganda untuk meramalkan pengaruh dua variabel predictor atau lebih terhadap satu variabel kriterium atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y) (Indah S, 2023).

Bentuk persamaan garis regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + e$$

Keterangan : Y : Kinerja Keuangan Perusahaan

X1 : Dewan Komisaris Independen

X2 : Komite Audit

α : konstanta

β : 1, 2, : koefisien regresi

e : error

b. Uji T (t-test)

Uji T (uji parsial) digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel Dewan Komisaris Independen, Komite Audit terhadap kinerja keuangan bank (ROA). Kriteria pengujian yang digunakan adalah dengan membandingkan t hitung dengan tabel berdasarkan tingkat signifikansi 0,05 dan 2 sisi dengan derajat kebebasan df ($n-k-1$) = $80-2-1 = 77$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel), sehingga t tabel yang diperoleh dari tabel statistic adalah sebesar 1,665. Hipotesis yang digunakan adalah: (Candra, 2021)

1) Berdasarkan nilai signifikansi

a) Jika nilai signifikansi kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak

b) Jika nilai signifikansi besar dari 0,05 maka tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak

2) Berdasarkan perbandingan nilai t hitung dan t tabel

a) Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima atau menolak H_a

b) Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak atau menerima H_a

Uji-t (t-test) digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok (misalnya uji-t satu sampel, uji-t dua sampel independen, uji-t berpasangan) (Abdillah, Leon A, 2024).

c. Uji simultan (uji F)

Uji simultan (Uji F) digunakan secara bersama-sama signifikansi pengaruh variabel Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit terhadap kinerja keuangan bank (ROA). Pengujian ini menggunakan alat uji statistic metode *fisher* (uji F) pada tingkat kepercayaan signifikansi 0,05. Kriteria pengujiannya adalah dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} yang dapat diketahui dengan menghitung df_1 (jumlah total variabel-1) = $3-1 = 2$, dan df_2 ($n-k-1$) = $80-2-1 = 77$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel

independen), sehingga F_{tabel} yang diperoleh dari tabel statistic adalah sebesar 2,72. Apabila $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak, dan apabila $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima (Candra, 2021).

d. Uji R Square

Selain karakteristik hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, satu hal yang tidak kalah pentingnya untuk diketahui adalah seberapa kuat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang terjadi. Oleh sebab itu, ada analisis untuk menentukan derajat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah koefisien determinasi. Melalui koefisien determinasi, seberapa jauh suatu variabel bebas menentukan perubahan nilai variabel terikat dapat diketahui. Besarnya nilai koefisien determinasi terletak antara nol dan satu (santosa, Purbayu Budi & Hamdani, 2007).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Profil Bursa Efek Indonesia

Objek penelitian ini adalah perbankan syariah yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC.

Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

b. Profil PT. Bank Aladin Syariah Tbk

PT Bank Aladin Syariah Tbk, selanjutnya disebut Bank Aladin Syariah, pertama kali didirikan pada tanggal 16 September 1994 dengan nama PT Bank Maybank Nusa International sebagai bank umum konvensional. Pendirian ini merupakan hasil kerja sama (*joint venture*) antara Malayan Banking (Maybank) Berhad dari Malaysia dengan Bank

Nusa Nasional dari Indonesia. Pada 11 September 2000, nama bank diubah menjadi PT Bank Maybank Indocorp, seiring dengan peralihan kepemilikan saham Bank Nusa Nasional kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Seiring dengan perubahan fokus usaha menjadi bank syariah, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010, bank ini kembali berganti nama menjadi PT Bank Maybank Syariah Indonesia (MSI).

Pada tahun 2011, melalui Akta Notaris Aliya S. Azhar No. 27 tanggal 19 Desember 2011, struktur kepemilikan MSI berubah, di mana 30.000 saham milik pemerintah dijual kepada Maybank dan selanjutnya Maybank menjual 9.451 saham kepada PT Prosperindo. Kemudian pada 15 Mei 2019, Maybank dan Prosperindo sebagai pemegang saham MSI menandatangani perjanjian jual beli saham dengan PT NTI Global Indonesia (NTI) dan PT Berkah Anugerah Abadi (BAA) untuk mengalihkan seluruh saham mereka. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 5 tanggal 3 Juli 2019, MSI resmi berganti nama menjadi PT Bank Net Indonesia Syariah (BNS) dan mengubah fokus bisnis dari korporasi menjadi ritel dengan sasaran utama sektor UMKM. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian menyetujui akuisisi tersebut melalui Surat Keputusan No. KEP-218/D.03/2019 dan No. KEP-219/D.03/2019 tanggal 12 Desember 2019, diikuti dengan perubahan nama resmi pada 20 Desember 2019 melalui SK Deputi Komisioner OJK No. KEP-113/PB.1/2019.

Dalam rangka memperkuat permodalan dan kinerja, berdasarkan Akta No. 1 tanggal 2 November 2020, para pemegang saham menyetujui rencana IPO dengan menerbitkan maksimal 5 miliar saham bernominal Rp100 per saham dan mencatatkannya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perubahan status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM melalui

SK No. AHU-0074002.AH.01.02.Tahun 2020 dan dicatat dalam sistem AHU dengan No. AHU-AH.01.03-0403667. OJK kemudian mengeluarkan surat pernyataan efektif No. S-8/D.04/2021 pada 22 Januari 2021, dan pada 1 Februari 2021, saham BNS resmi tercatat di BEI dengan kode saham “BANK”. Saham-saham tersebut ditawarkan dengan harga Rp103 per saham dan disertai 2,8 miliar Waran Seri I sebagai insentif, yang dapat dikonversi menjadi saham hingga 30 Januari 2026.

Selanjutnya, melalui RUPSLB yang diaktakan dalam Akta No. 11 tanggal 7 April 2021, pemegang saham menyetujui perubahan nama perusahaan dari PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk. Perubahan ini disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui SK No. AHU-0021937.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 12 April 2021 dan disetujui OJK melalui SK No. KEP-42/PB.1/2021 tanggal 3 Juni 2021. Anggaran Dasar perusahaan pun disesuaikan melalui Akta No. 33 tanggal 12 April 2021. Sejak saat itu, Bank Aladin Syariah mulai menargetkan segmen underbanked dan unbanked, serta memperkuat kolaborasi strategis dengan berbagai mitra, seperti Alfamart (untuk memperluas jangkauan layanan), Google Cloud Indonesia (untuk mempercepat inklusi keuangan melalui teknologi), Evermos (untuk mendukung reseller dan UMKM), serta ZA Tech Global Limited (untuk mendorong adopsi InsurTech di Indonesia).

Untuk memenuhi ketentuan OJK terkait konsolidasi permodalan bank umum (POJK No. 12 Tahun 2022), Bank Aladin melaksanakan dua aksi korporasi. Pertama, melalui HMETD (right issue) yang dilakukan pada 23 Mei – 7 Juni 2022, sebanyak 504.264.065 saham berhasil dieksekusi dengan harga pelaksanaan Rp2.000 per saham, menghasilkan dana sebesar Rp1,008 triliun yang digunakan untuk pembiayaan dan mendukung kinerja perusahaan. Kedua, pada 29 Desember 2022, Bank melakukan PMTHMETD dengan menerbitkan 850 juta saham baru seharga Rp1.400 per saham, yang seluruhnya

diserap oleh PT BNC Technologies Ventures dan menjadikan entitas tersebut sebagai pemegang saham baru dengan kepemilikan 5,80%. Dana dari aksi ini digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan ekspansi usaha Bank Aladin Syariah.

c. Profil Bank Syariah Indonesia Tbk

Kehadiran PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“Bank Syariah Indonesia”, “BSI”, “Bank”) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H merupakan catatan sejarah baru bagi industri perbankan di Indonesia. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara.

Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI.

Komposisi pemegang saham BSI adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 51,47%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 23,24%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 15,38%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.

Penggabungan ini merupakan ikhtiar menyatukan kelebihan dari 3 (tiga) bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong agar dapat bersaing di tingkat global.

BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah perbankan Syariah di

Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil ‘Aalamiin).

Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang.

d. Profil PT. Bank BTPN Syariah Tbk

PT Bank BTPN Tbk (Bank BTPN) didirikan pada tahun 1958 di Bandung, Jawa Barat. Bank BTPN merupakan bank hasil penggabungan usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) di tahun 2019.

Pasca penggabungan, Bank BTPN dalam menjalankan bisnisnya menjadi bank universal dengan dukungan teknologi digital yang memiliki bisnis lebih lengkap untuk melayani nasabah lebih luas, mulai dari segmen ritel hingga korporasi.

BTPN Syariah menjadi Bank Umum Syariah ke-12 Indonesia. BTPN Syariah adalah satu-satunya bank di Indonesia yang memfokuskan dirinya menjangkau dan memberikan layanan perbankan pada segmen masyarakat inklusi yang selama ini belum tersentuh oleh bank, dimana hal ini telah dilakukan oleh BTPN Syariah sejak masih menjadi Unit Usaha Syariah BTPN. Komitmen inilah yang secara konsisten mengiringi setiap langkah BTPN Syariah guna memberi manfaat nyata bagi jutaan nasabah agar dapat mewujudkan niat baik lebih cepat dan meraih hidup yang lebih berarti.

Untuk menjalankan amanah berupa kegiatan pemberdayaan dan literasi keuangan terutama bagi perempuan di segmen masyarakat inklusi, BTPN Syariah mendampingi dan memberikan akses, layanan, serta produk perbankan yang tepat sesuai prinsip syariah sehingga

mereka dapat meraih mimpi dan membangun kehidupan yang lebih baik.

Selain terus bertumbuh secara sehat dan memiliki kinerja keuangan yang baik, sebagai satu-satunya bank syariah di Indonesia yang memusatkan pelayanan dan produknya bagi pemberdayaan nasabah inklusi, dan mengembangkan keuangan inklusif, BTPN Syariah terus berupaya memberikan nilai tambah melalui dampak nyata perubahan positif bagi kehidupan nasabah yang dilayaninya. Hingga saat ini, jangkauan kegiatan operasional BTPN Syariah telah mencakup hingga 23 provinsi di Indonesia.

PT Bank BTPN Syariah Tbk | Laporan Tahunan 2023 68
Kedepannya BTPN Syariah terus meningkatkan dan mengembangkan produk dan layanan secara tepat guna bagi nasabah agar membawa lebih banyak manfaat bagi jutaan masyarakat di Indonesia dan mewujudkan Rahmatan Lil Alamin.

e. Profil PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Perseroan (PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk) semula bernama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja sesuai dengan akta berdirinya yang dibuat oleh Moeslim Dalidd, notaris di Malang, yaitu Akta Perseroan Bank Terbatas No. 12 tanggal 8 Januari 1972. Perseroan telah beberapa kali melakukan perubahan nama, berturut-turut dimulai dengan nama PT Bank Bersaudara Djaja. Perubahan nama tersebut didasarkan pada Akta Berita Acara Rapat No. 25 tanggal 8 Januari 1990, yang dibuat oleh Indrawati Setiabudhi, S.H., notaris di Malang. Kemudian, berdasarkan Akta Berita Acara No. 27 tanggal 27 Maret 1997 yang dibuat oleh Alfian Yahya, S.H., notaris di Surabaya, Perseroan kembali berganti nama menjadi PT. Bank Harfa. Kemudian, nama tersebut kembali mengalami perubahan menjadi PT. Bank Panin Syariah berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 1 tanggal 3 Agustus 2009, yang dibuat oleh Drs. Bambang Tedjo Anggono Budi, S.H., M.Kn., pengganti dari Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta. Perubahan

tersebut sehubungan perubahan kegiatan usaha Perseroan dari semula menjalankan kegiatan usaha perbankan konvensional menjadi kegiatan usaha perbankan syariah dengan berdasarkan Prinsip Syariah.

Sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari semula perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, nama PT Bank Panin Syariah selanjutnya berubah menjadi PT Bank Panin Syariah Tbk berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 71 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta. Pada 2016, nama PT Bank Panin Syariah, Tbk diubah menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sehubungan dengan masuknya Dubai Islamic Bank PJSC sebagai salah satu Pemegang Saham Pengendali, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 54 tanggal 19 April 2016, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, notaris di Jakarta. Perubahan tersebut berlaku efektif sejak 11 Mei 2016 sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-0008935.AH.01.02. TAHUN 2016 tanggal 11 Mei 2016.

Penetapan penggunaan izin usaha dengan nama baru PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk telah diterima dari OJK, sesuai salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep29/D.03/2016 tanggal 26 Juli 2016.

Sejak mengawali keberadaan di industri perbankan Syariah di Indonesia, Perseroan secara konsisten menunjukkan kinerja dan pertumbuhan usaha yang baik. Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Panin Tbk sebagai salah satu bank swasta terbesar di antara 10 (sepuluh) bank swasta terbesar lainnya di Indonesia, serta Dubai Islamic Bank PJSC yang merupakan salah satu bank Islam terbesar di dunia, telah membantu tumbuh kembang Perseroan.

Selain itu, kepercayaan nasabah yang menggunakan berbagai produk pembiayaan dan menyimpan dananya kepada Perseroan juga turut berkontribusi pada perkembangan aset perseroan yang pesat. Perseroan akan terus berupaya dan berkomitmen untuk menjaga

kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

2. Analisis Deskriptif

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sumber data ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia melalui web www.idx.co.id. Data yang diperoleh dalam bentuk laporan keuangan dan laporan tata kelola perusahaan. Jumlah data yang berhasil dikumpulkan sebanyak 80 sampel dan data yang dikumpulkan tersebut berupa dewan komisaris independen, komite audit dan kinerja keuangan bank.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan *triwulan* bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Data mentah yang digunakan adalah jumlah dewan komisaris independen, jumlah komite audit dan kinerja keuangan. Data tersebut dapat dilihat pada bagian lampiran.

3. Statistic Deskriptif

Statistik deskriptif ini memiliki tujuan untuk acuan terhadap data-data di variabel penelitian yang dipakai dalam penelitian. Selain itu statistic deskriptif juga dipakai menjelaskan seputar ringkasan dari sampel penelitian seperti mean, maksimum, minimum dan standar deviasi. Berdasarkan pengujian statistik yang telah dilakukan oleh peneliti, diperoleh pengolahan data secara deskriptif sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Hasil Statistik Deskriptif

	Y_ROA	X1_DKI	X2_KA
Mean	3.415550	0.592875	1.402125
Median	1.790000	0.670000	1.390000
Maximum	17.23000	0.750000	2.400000
Minimum	-10.85000	0.330000	1.100000
Std. Dev.	6.201973	0.103962	0.334387
Skewness	0.159707	-0.175822	1.405231
Kurtosis	2.584663	1.779686	4.634071

Jarque-Bera	0.915098	5.376061	35.22961
Probability	0.632833	0.068015	0.000000
Sum	273.2440	47.43000	112.1700
Sum Sq. Dev.	3038.693	0.853839	8.833339
Observations	80	80	80

Sumber data: Data sekunder yang diolah dengan evIEWS 13 tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan komite audit terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio ROA dapat diprediksi sebagai berikut:

a. Return On Asset (ROA)

Dari data tersebut diketahui bahwa ROA mempunyai nilai minimum sebesar -10.85 yang terdapat pada bank aladin syariah tahun 2022 triwulan 4, nilai maksimum sebesar 17.23 yang terdapat pada bank aladin syariah tahun 2020 triwulan 2. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya nilai ROA yang menjadi sampel untuk penelitian ini berkisar 17.23 sampai -10.85 dengan nilai rata-rata sebesar 3.42 pada standar deviasi 6.20. maka dapat disimpulkan nilai ROA tertinggi terdapat pada Bank Aladin Syariah pada tahun 2020 triwulan 2 sedangkan nilai ROA terendah terdapat pada Bank Aladin Syariah tahun 2022 triwulan 4.

b. Dewan Komisaris Independen

Dari data tersebut diketahui bahwa DKI mempunyai nilai minimum sebesar 0.33 yang terdapat pada bank Panin Dubai Syariah tahun 2021 triwulan 4, nilai maksimum sebesar 0.75 yang terdapat dari beberapa bank yaitunya pada bank Aladin Syariah tahun 2020 triwulan 4 tahun 2021 triwulan 1, 3 dan 4, Bank Syariah Indonesia tahun 2019 triwulan 1, dan pada BTPN Syariah tahun 2023 triwulan 2, 3, dan 4. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya nilai DKI yang menjadi sampel untuk penelitian ini berkisar 0.75 sampai 0.33 dengan nilai rata-rata sebesar 0.59 pada standar deviasi 0.10 maka dapat disimpulkan

nilai DKI tertinggi terdapat pada Bank Aladin Syariah, Bank Syariah Indonesia dan BTPN Syariah dengan tahu dan triwulan yang beragam.

c. Komite Audit

Dari data tersebut diketahui bahwa KA mempunyai nilai minimum sebesar 1.10 yang terdapat pada berbagai bank yaitu bank Aladin Syariah tahun 2021 triwulan 4, BTPN Syariah tahun 2020, 2021 triwulan 1, 2, 3, 4 (kecuali 2021), nilai maksimum sebesar 2.40 yang terdapat pada Bank Syariah Indonesia tahun 2021 triwulan 1, 2, 3. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya nilai KA yang menjadi sampel untuk penelitian ini berkisar 2.40 sampai 1.10 dengan nilai rata-rata sebesar 1.40, pada standar deviasi 0.33 maka dapat disimpulkan nilai KA tertinggi terdapat pada Bank Syariah Indonesia tahun 2021 triwulan 1, 2, 3.

4. Hasil Uji Regresi Data Panel

a. Metode Regresi Data Panel

1) Uji *chow* (*likelihood Test Rasio*)

Uji *chow* adalah pengujian dalam menentukan model *fixed effect* atau *random effect* lebih tepatnya untuk menentukan meestimasikan data panel. Hipotesis dalam uji *chow* adalah :

H_0 : *Common Effect Model* (Nilai *Probability* > 0,05)

H_a : *Fixed Effect Model* (Nilai *Probability* < 0,05)

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil pada tabel berikut:

Tabel 4. 2
Hasil Uji *Chow*

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: MODEL_FEM
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	15.798386	(3,74)	0.0000
Cross-section Chi-square	39.598872	3	0.0000

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan evIEWS 13

Berdasarkan tabel 4.2 diatas data pengolahan tersebut menunjukkan bahwa nilai periode F_{hitung} sebesar 15.79 dan nilai F_{tabel} 3.47 dan memiliki *probability* $0.00 < 0.05$ sehingga model yang lebih tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*

2) Uji Hausman

Uji Hausman adalah pengujian statistik untuk menentukan apakah model *Fixed Effect* model atau *Random Effect* model yang lebih tepat digunakan dalam regresi data panel. Hipotesis dalam melakukan pengujian ini adalah:

H_0 : *Random Effect Model* (Nilai *Probability* $> 0,05$)

H_a : *Fixed Effect Model* (Nilai *Probability* $< 0,05$)

Jika hasil hausman tersebut menyatakan menerima hipotesis nol maka dipilih model terbaik yaitu menggunakan model *Random Effect*. Sedangkan, jika hasilnya menolak hipotesis nol maka dipilih model terbaik yaitu menggunakan model *Fixed Effect*.

Jika hasil uji hausman menunjukkan nilai probabilitas *chi-sqi*.statistik dibawah 0.05 maka H_0 ditolak dan model *Fixed Effect* yang lebih tepat digunakan. Namun sebaliknya jika uji hausman menunjukkan nilai probabilitas *Chi-Sq. Statistic* diatas 0.05 maka H_0 diterima dan model *Random Effect* yang lebih tepat digunakan.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: MODEL_REM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.736130	2	0.4198

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan eviews 13

Hasil uji Hausman menunjukkan nilai *Chi-Square* sebesar 1,736 dengan probabilitas 0,4198. Karena nilai probabilitas lebih

besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model *Random Effect* lebih tepat digunakan dibandingkan dengan *Fixed Effect*.

3) Uji Lagrange Multiplier

Untuk mengetahui apakah *Fixed Effect* lebih baik dari pada *Random Effect* digunakan model *Lagrange Multiplier*. Untuk menentukan model yang akan digunakan maka hipotesis tersebut dengan kriteria sebagai berikut :

Jika nilai *breusch-pagan* $\geq 0,05$ maka H_0 diterima

Jika nilai *breusch-pagan* $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak

Hipotesis disusun sebagai berikut:

H_0 : menggunakan *Common Effect Model* (*breusch-pagan* $\geq 0,05$)

H_a : menggunakan *Random Effect Model* (*breusch-pagan* $\leq 0,05$)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	140.5146 (0.0000)	3.470026 (0.0625)	143.9847 (0.0000)
Honda	11.85389 (0.0000)	-1.862801 (0.9688)	7.064765 (0.0000)
King-Wu	11.85389 (0.0000)	-1.862801 (0.9688)	10.32817 (0.0000)
Standardized Honda	16.88897 (0.0000)	-1.781928 (0.9626)	4.755180 (0.0000)
Standardized King-Wu	16.88897 (0.0000)	-1.781928 (0.9626)	11.04238 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	140.5146 (0.0000)

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan evIEWS 13

Uji LM menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 pada semua jenis uji (*Breusch-Pagan, Honda, dan King-Wu*), yang berarti model panel lebih baik digunakan dibandingkan model regresi biasa

(*pooled OLS*). Maka, dapat dikatakan bahwa model *Random Effect* adalah model paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

b. Estimasi dengan pendekatan *Random Effect Model*

Dari hasil uji *laqrange multiplier* metode yang paling tepat digunakan dalam estimasi regresi data panel pada penelitian ini adalah *random effect* model karena nilai probabilitas $0.00 < 0,05$

Tabel 4. 5

Hasil estimate *random effect* model

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	56.60274 (0.0000)	2.504953 (0.1135)	59.10769 (0.0000)
Honda	7.523479 (0.0000)	-1.582704 (0.9433)	4.200762 (0.0000)
King-Wu	7.523479 (0.0000)	-1.582704 (0.9433)	6.407270 (0.0000)
Standardized Honda	13.27646 (0.0000)	-1.515671 (0.9352)	1.469930 (0.0708)
Standardized King-Wu	13.27646 (0.0000)	-1.515671 (0.9352)	6.731814 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	56.60274 (0.0000)

5. Uji Asumsi Klasik

a. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui data terdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji *Jarque Bera*.

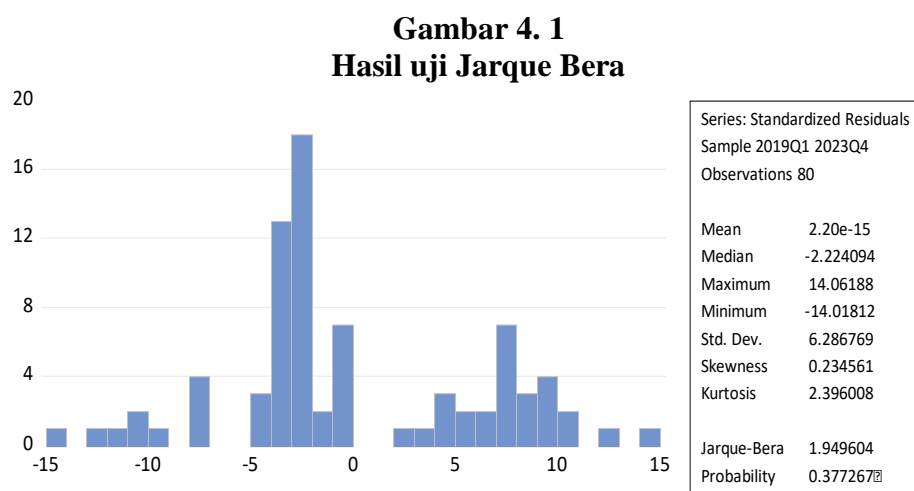
Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode *Jarque-Bera*, yang bertujuan untuk mengetahui apakah data dalam model

berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

Jika nilai probability $> 0,05$, maka data berdistribusi normal.

Jika nilai probability $< 0,05$, maka data tidak berdistribusi normal.

Hasil uji J-B test dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Data sekunder yang diolah dengan *eviews* 13 tahun 2025

Berdasarkan gambar 4.1 diatas menunjukkan hasil perhitungan uji *jarque bera* adalah sebesar 1.949604 dengan nilai probability 0.377267 yang berarti data berdistribusi normal karena $0.377267 > 0.05$.

b. Uji multikoloniaritas

Uji multikolineritas merupakan keadaan dimana terdapat hubungan linier atau terdapat korelasi antar variabel independen. Dalam penelitian ini untuk menguji apakah ada atau tidaknya multikolineritas dilihat dari perbandingan antara nilai R2 regresi parsial (*auxialary regression*) dengan nilai R2 regresi utama. Apabila nilai R2 regresi parsial (*auxialary regression*) lebih besar dibandingkan dengan R2 regresi utama, maka dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan tersebut terjadi multikolineritas, begitu juga sebaliknya jika nilai R2 regresi parsial (*auxialary regression*) lebih kecil dibandingkan dengan

R²regresi utama, maka dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan tersebut tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4. 6
Hasil uji multikolinieritas

Variance Inflation Factors
Date: 08/07/25 Time: 23:26
Sample: 1 80
Included observations: 80

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	38.85276	86.59408	NA
X1_DKI	51.92411	41.71001	1.197455
X2_KA	4.865652	22.44898	1.197455

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan evIEWS 13

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Menurut Ghazali (2018), suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinieritas apabila nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10.

Berdasarkan Tabel 4.6 hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa variabel independen X1_DKI memiliki nilai centered VIF sebesar 1,197455, sedangkan variabel X2_KA memiliki nilai centered VIF sebesar 1,197455. Nilai tersebut masih jauh di bawah angka 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi ini.

Dengan demikian, model regresi yang digunakan layak untuk digunakan dalam pengujian berikutnya karena memenuhi asumsi klasik multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada model regresi. Dalam regresi linear klasik, salah satu asumsi penting adalah bahwa residual harus memiliki varians yang konstan atau homokedastisitas. Jika terjadi heteroskedastisitas maka, varians residual berbeda-beda antar

pengamatan, yang dapat menyebabkan estimasi koefisien dan uji statistic menjadi tidak valid.

Metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas adalah uji *glejser*.

Tabel 4. 7
Hasil uji heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	1.965949	Prob. F(2,77)	0.1470
Obs*R-squared	3.886625	Prob. Chi-Square(2)	0.1432
Scaled explained SS	3.985223	Prob. Chi-Square(2)	0.1363

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan evIEWS 13

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 4.7 diperoleh nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,1470, nilai probabilitas Obs*R-squared sebesar 0,1432, dan nilai probabilitas Scaled explained SS sebesar 0,1363. Seluruh nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengandung masalah heteroskedastisitas atau bersifat homoskedastis. Oleh karena itu, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk dilanjutkan ke tahap pengujian berikutnya.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara residual pada satu periode dengan residual pada periode sebelumnya dalam suatu model regresi. Dalam model regresi linear yang baik, residual seharusnya tidak saling berkorelasi atau bersifat acak. Jika terjadi autokorelasi, maka asumsi klasik regresi akan dilanggar, yang dapat menyebabkan hasil estimasi menjadi tidak efisien dan statistic uji menjadi tidak valid. Salah satu mode yang digunakan untuk menguji autokorelasi adalah *Durbin-Watson*.

Menurut (Santoso, 2019) salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 ($DW < -2$)
- 2) Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau $-2 < DW < +2$
- 3) Terjadi autokorelasi negatif jika DW diatas +2 atau $DW > +2$.

Tabel 4. 8
Hasil uji Autokorelasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.276202	0.413025	-0.668730	0.5058
D(X1_DKI)	5.256439	6.031368	0.871517	0.3863
D(X2_KA)	2.135039	2.505831	0.852028	0.3970
Effects Specification				
			S.D.	Rho
			0.000000	0.0000
			3.600400	1.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.020359	Mean dependent var	-0.278947	
Adjusted R-squared	-0.006481	S.D. dependent var	3.542667	
S.E. of regression	3.554128	Sum squared resid	922.1232	
F-statistic	0.758534	Durbin-Watson stat	2.770939	
Prob(F-statistic)	0.472008			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.020359	Mean dependent var	-0.278947	
Sum squared resid	922.1232	Durbin-Watson stat	2.770939	

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan evIEWS 13

Pada penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan statistik Durbin–Watson (DW) pada model regresi panel dengan metode *Random Effect* setelah transformasi diferensiasi. Hasil pengujian menunjukkan nilai Durbin–Watson sebesar 2,770939.

Nilai DW yang mendekati 2 mengindikasikan tidak adanya autokorelasi, sedangkan nilai DW jauh di bawah 2 menunjukkan adanya autokorelasi positif, dan nilai DW jauh di atas 2 menunjukkan adanya autokorelasi negatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai DW sebesar 2,770939 masih berada di sekitar angka 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi.

Dengan demikian, asumsi klasik mengenai tidak adanya autokorelasi telah terpenuhi sehingga model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

6. Analisis regresi data panel

Regresi linear data panel digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independent terhadap satu variabel dependen. Dari hasil olahan data panel diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 9
Hasil uji regresi data panel model REM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.276202	0.413025	-0.668730	0.5058
D(X1_DKI)	5.256439	6.031368	0.871517	0.3863
D(X2_KA)	2.135039	2.505831	0.852028	0.3970
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.000000	0.0000
Idiosyncratic random			3.600400	1.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.020359	Mean dependent var	-0.278947	
Adjusted R-squared	-0.006481	S.D. dependent var	3.542667	
S.E. of regression	3.554128	Sum squared resid	922.1232	
F-statistic	0.758534	Durbin-Watson stat	2.770939	
Prob(F-statistic)	0.472008			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.020359	Mean dependent var	-0.278947	
Sum squared resid	922.1232	Durbin-Watson stat	2.770939	

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan eviews 13

Analisis regresi data panel digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen (Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit) terhadap variabel Y dependent (Kinerja Keuangan). Persamaan regresi data panel dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = -0.276202 + 5.256439 \cdot X_1 + 2.135039 X_2 + e$$

Dari persamaan regresi data panel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar $-0,276202$ dengan probabilitas $0,5058 > 0,05$ menunjukkan bahwa konstanta tidak signifikan. Artinya, jika variabel dewan komisaris independen dan komite audit tidak berubah, maka kinerja keuangan cenderung menurun sebesar $0,2762$, namun penurunan ini tidak signifikan secara statistik.
- b. Dewan Komisaria Independen memiliki koefisien sebesar $5,256439$ dengan nilai probabilitas $0,3863 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa perubahan pada dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, namun pengaruh tersebut tidak signifikan.
- c. Komite audit memiliki koefisien sebesar $2,135039$ dengan nilai probabilitas $0,3970 > 0,05$. Ini menunjukkan bahwa perubahan pada komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, namun pengaruhnya juga tidak signifikan.

7. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial / Uji T

Uji parsial (uji t) merupakan uji yang bertujuan untuk menunjukkan mengenai seberapa jauh pengaruh suatu variabel independent yakni dewan komisaris independen dan komite audit secara individual untuk menerangkan variasi variabel dependent yaitu kinerja keuangan, apakah ia berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent atau tidak. Untuk mencari pada uji t nilai signifikan $< \alpha = 0,05$ dan nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$.

Jika nilai Prob. $< 0,05$, maka variabel berpengaruh signifikan.

Jika nilai Prob. $> 0,05$, maka variabel tidak berpengaruh signifikan.

Hasil uji analisis regresi koefisien dengan menggunakan eviews 13 terlihat pada tabel 4.10 di bawah ini:

Tabel 4. 10
Hasil Uji Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.276202	0.413025	-0.668730	0.5058
D(X1_DKI)	5.256439	6.031368	0.871517	0.3863
D(X2_KA)	2.135039	2.505831	0.852028	0.3970

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan eviews 13

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.10 maka diperoleh hasil yaitu:

- 1) Konstanta(C) nilai t-hitung = $-0,6687 < t\text{-tabel (1,664)}$ dengan probabilitas $0,5058 > 0,05$. Artinya konstanta berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan namun tidak signifikan, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak
- 2) X1 (Dewan Komisaris Independen) nilai t-hitung = $0,8715 < t\text{-tabel (1,664)}$ dengan probabilitas $0,3863 > 0,05$. Artinya dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sehingga H_0 diterima.
- 3) X2 (Komite Audit) nilai t-hitung = $0,8520 < t\text{-tabel (1,664)}$ dengan probabilitas $0,3970 > 0,05$. Artinya komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sehingga H_0 diterima.

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu pun variabel independen yang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan pada periode 2019-2023. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) untuk masing-masing variabel diterima, dan hipotesis alternative (H_a) di tolak.

b. Uji Simultan /Uji F

Uji simultan (uji F) merupakan uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang digunakan dalam model regresi ini mempengaruhi secara bersama-sama terhadap variabel dependent.

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

dalam model regresi yang digunakan. Dalam penelitian ini, variabel independen yang dihipotesiskan adalah Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit sedangkan variabel dependen adalah kinerja keuangan.

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan adalah:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak
- 2) Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_a diterima
- 3) Jika nilai probabilitas < 0.05 , maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- 4) Jika nilai probabilitas > 0.05 , H_0 diterima dan H_a ditolak

Hipotesis Uji F:

- 1) H_0 : Variabel dewan komisaris independen dan komite audit secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
- 2) H_1 : Variabel dewan komisaris independen dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Tabel 4. 11
Hasil Uji Simultan

R-squared	0.020359	Mean dependent var	-0.278947
Adjusted R-squared	-0.006481	S.D. dependent var	3.542667
S.E. of regression	3.554128	Sum squared resid	922.1232
F-statistic	0.758534	Durbin-Watson stat	2.770939
Prob(F-statistic)	0.472008		

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan eviews 13

Berdasarkan output E-Views, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) $F_{hitung} (0.758534) < F_{tabel} (3,12)$
- 2) $Prob(F\text{-statistic}) (0.472008) > 0.05$

Karena $F_{hitung} (0.758534) < F_{tabel} (3,12)$ dan probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya, secara simultan variabel independen dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dengan demikian, model regresi panel setelah transformasi diferensiasi menunjukkan bahwa variabel independen tidak mampu menjelaskan variasi perubahan kinerja keuangan secara bersama-sama.

c. Uji Koefisien Determinan (R²)

Uji koefisien determinasi ditujukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi (R²) semakin besar atau mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel bebas (Dewan Komisaris Independen) adalah besar terhadap variabel terikat kinerja keuangan. Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti dengan variabel terikat.

Tabel 4. 12
Hasil uji koefisien Determinan (R²)

R-squared	0.020359	Mean dependent var	-0.278947
Adjusted R-squared	-0.006481	S.D. dependent var	3.542667
S.E. of regression	3.554128	Sum squared resid	922.1232
F-statistic	0.758534	Durbin-Watson stat	2.770939
Prob(F-statistic)	0.472008		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.020359	Mean dependent var	-0.278947
Sum squared resid	922.1232	Durbin-Watson stat	2.770939

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan eviews 13 tahun 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai R-squared sebesar 0,020359 dan nilai Adjusted R-squared sebesar -0,006481. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel independen dewan komisaris independen dan komite audit hanya mampu menjelaskan variasi perubahan variabel dependen kinerja keuangan sebesar 2,03%, sedangkan sisanya sebesar 97,97% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Adjusted R-squared yang bernilai negatif bukan berarti data yang digunakan tidak valid, melainkan menunjukkan bahwa model regresi yang dibentuk belum sesuai dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Nilai negatif ini dapat terjadi karena dalam regresi data panel, penambahan variabel independen yang tidak signifikan secara statistik

dapat menyebabkan penurunan nilai Adjusted R-squared, bahkan menjadi negatif. Artinya, secara keseluruhan, variabel-variabel independen dalam model ini belum mampu memberikan kontribusi yang kuat terhadap perubahan variabel dependen.

Dengan demikian, hasil ini menjadi indikasi bahwa model tidak memiliki daya jelaskan yang baik terhadap fenomena yang diteliti, meskipun semua proses pengujian regresi dan asumsi klasik telah dilakukan sesuai prosedur.

B. Pembahasan

Penelitian ini merupakan pengujian dari pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Setelah melakukan beberapa pengujian yaitu uji model estimaasi, uji asumsi klasik, analisis refresi data panel dan uji hipotesis. Maka selanjutnya akan ditelaah lebih lanjutnya mengenai pengaruh dari masing-masing variabel yakni sebagai berikut:

1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Menurut teori agensi, hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, di mana manajer tidak selalu bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif, salah satunya melalui keberadaan Dewan Komisaris Independen. Komisaris Independen diharapkan dapat menjalankan fungsi monitoring agar manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham serta memastikan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) berjalan dengan baik.

Secara teoritis, semakin besar proporsi Dewan Komisaris Independen maka pengawasan terhadap manajemen akan semakin kuat, sehingga dapat meminimalisasi risiko penyalahgunaan wewenang dan

meningkatkan efektivitas pengelolaan aset perusahaan yang pada akhirnya mendorong peningkatan *Return on Assets* (ROA).

Namun, hasil pengujian regresi data panel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dewan Komisaris Independen memiliki nilai koefisien sebesar 5,256439 dengan arah positif, nilai t-statistik sebesar 0,871517, serta probabilitas sebesar 0,3863. Dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-tabel $\pm 1,664$, maka t-hitung (0,871) < t-tabel (1,664) serta p-value (0,3863) > 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Syariah yang terdaftar di BEI periode 2019–2023.

Walaupun koefisien menunjukkan arah positif (sejalan dengan teori agensi), namun ketidaksignifikanan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Peran Dewan Komisaris Independen belum efektif Keberadaan Dewan Komisaris Independen sering kali hanya untuk memenuhi regulasi OJK, sehingga fungsi pengawasan yang dijalankan lebih bersifat formalitas. Akibatnya, keberadaan mereka belum memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kinerja keuangan profitabilitas (ROA).
- b. Dampak kondisi eksternal (2019–2023). Periode penelitian mencakup tahun 2020–2021 saat pandemi COVID-19 melanda, yang menyebabkan peningkatan pembiayaan bermasalah (NPF) dan penurunan laba perbankan syariah. Bahkan di 2022–2023, kondisi makroekonomi seperti inflasi, kenaikan suku bunga acuan, serta ketidakpastian global juga menekan kinerja keuangan. Faktor eksternal ini lebih dominan memengaruhi kinerja keuangan dibandingkan faktor internal tata kelola.
- c. Orientasi pengawasan lebih pada kepatuhan, bukan kinerja Dewan Komisaris Independen lebih berfokus pada aspek kepatuhan dan tata kelola yang baik (*compliance*) sesuai regulasi, sehingga dampaknya terhadap kinerja keuangan belum terlihat signifikan.

Dengan demikian, meskipun teori agensi menekankan pentingnya keberadaan Dewan Komisaris Independen dalam meminimalkan konflik kepentingan dan meningkatkan kinerja perusahaan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023, Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti bahwa mekanisme *good corporate governance* melalui Dewan Komisaris Independen belum sepenuhnya mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mayla Hadyan tahun 2021 dengan judul “*Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan*” yang diterbitkan dalam jurnal Akuntansi Kompetif dalam penelitian tersebut, Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Dengan taraf signifikansi sebesar $0.999 > 0.05$.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hania Pebriana dengan judul “*Pengaruh Good Corporate Governance Dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah*” yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

2. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Menurut teori agensi adanya pemisahan kepemilikan dan pengelolaan dalam perusahaan menimbulkan potensi konflik kepentingan (*agency conflict*). Manajer (*agent*) tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham (*principal*), sehingga diperlukan mekanisme tata kelola yang mampu mengurangi konflik tersebut. Salah satu mekanisme penting adalah Komite Audit, yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan, khususnya terhadap

kualitas laporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas pengendalian internal.

Secara teoritis, semakin efektif peran Komite Audit (dari sisi jumlah anggota, keahlian, maupun independensi), maka kualitas pengawasan akan semakin baik. Hal ini dapat meningkatkan transparansi, mencegah praktik manajemen laba, serta menjaga kualitas aset bank. Dampaknya, kinerja keuangan perusahaan yang dalam penelitian ini diukur dengan *Return on Assets* (ROA) diharapkan akan meningkat.

Berdasarkan hasil regresi data panel, variabel Komite Audit memiliki nilai koefisien sebesar 2,135039 dengan arah positif, nilai t-statistik 0,852028, serta probabilitas sebesar 0,3970. Dengan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dan t-tabel $\pm 1,664$, maka dapat dilihat bahwa t-hitung ($0,852$) < t-tabel ($1,99$) dan p-value ($0,3970$) > $0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Syariah yang terdaftar di BEI periode 2019–2023.

Ketidaksignifikanan ini dapat dijelaskan melalui beberapa hal:

- a. Peran Komite Audit belum optimal. Banyak bank syariah masih menjadikan keberadaan Komite Audit sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi OJK. Dalam praktiknya, pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif untuk menekan risiko pembiayaan bermasalah ataupun meningkatkan profitabilitas.
- b. Dampak pandemi COVID-19 (2020–2021). Pandemi menyebabkan penurunan pendapatan pembiayaan, peningkatan restrukturisasi kredit, dan menekan laba perbankan syariah. Sehebat apapun peran Komite Audit, faktor eksternal ini memiliki pengaruh lebih besar dalam menekan kinerja keuangan.
- c. Kondisi makroekonomi 2022–2023. Tahun 2022 ditandai dengan inflasi yang cukup tinggi dan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate), yang berdampak pada biaya dana (*cost of fund*). Sementara itu, ketidakpastian global di 2023 juga menekan sektor perbankan. Sehingga, kinerja keuangan lebih banyak dipengaruhi

faktor eksternal dibanding mekanisme GCG internal seperti Komite Audit.

- d. Orientasi pengawasan lebih pada kepatuhan regulasi Komite Audit di bank syariah lebih menekankan fungsi kepatuhan (*compliance*) pada standar akuntansi syariah dan aturan OJK, ketimbang strategi peningkatan profitabilitas. Hal ini membuat pengaruh langsung terhadap kinerja keuangan menjadi kurang signifikan.

Dengan demikian, meskipun berdasarkan teori agensi keberadaan Komite Audit diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan dan meningkatkan kinerja keuangan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode 2019–2023, Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam kondisi krisis global (pandemi COVID-19 dan ketidakpastian ekonomi), peran Komite Audit sebagai mekanisme GCG belum cukup kuat untuk mendorong peningkatan profitabilitas bank.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Henli Yoel Honi, dkk tahun 2022 dengan judul “*Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Tahun 2014-2018*” yang diterbitkan dalam jurnal EMBA, dalam penelitian tersebut, Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Dengan taraf signifikansi sebesar $0.376 > 0.05$.

Perbedaan hasil antara penelitian ini dengan penelitian Henli Yoel Honi, dkk. Penelitian ini menggunakan sampel bank syariah yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sedang penelitian yang dilakukan oleh Henli Yoel Honi, dkk menggunakan sampel penelitian terhadap bank umum konvensional tahun 2014-2018.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Candra Eki (2021) yang berjudul “*Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah*” yang menunjukkan hasil bahwa Komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) diperoleh nilai F-statistic sebesar 0,758534 dengan nilai probabilitas sebesar 0,4720. Dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), nilai F-hitung lebih kecil dibandingkan F-tabel ($0,7585 < 3,12$) dan probabilitas lebih besar dari 0,05 ($0,4720 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019–2023.

Menurut teori agensi, dewan komisaris independen dan komite audit merupakan mekanisme tata kelola perusahaan yang berfungsi mengurangi konflik kepentingan antara manajemen (agent) dan pemegang saham (principal). Dewan Komisaris Independen bertugas mengawasi kebijakan manajemen dan memastikan pengelolaan bank berjalan secara profesional dan transparan. Komite Audit berperan menilai efektivitas pengendalian internal, kualitas laporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perbankan dan syariah.

Secara teori, semakin kuat pengawasan dari kedua organ GCG tersebut maka semakin baik pula kinerja keuangan (ROA) bank. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh keduanya secara simultan tidak signifikan. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor berikut:

- a. Dampak Pandemi COVID-19 (2020–2021). Pandemi menekan kinerja perbankan syariah secara menyeluruh. Banyak nasabah mengalami kesulitan membayar kewajiban sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas aset dan penurunan laba. Dalam kondisi tersebut, keberadaan dewan komisaris independen dan komite audit tidak berperan besar dalam meningkatkan kinerja

keuangan, karena masalah utama berasal dari faktor eksternal pandemi, bukan kelemahan dalam tata kelola.

- b. Kondisi Makroekonomi (2019–2023) Periode penelitian mencakup fase ketidakpastian ekonomi akibat pandemi, pemulihan ekonomi global, fluktuasi inflasi, serta kenaikan suku bunga Bank Indonesia (*BI Rate*) pada 2022–2023 untuk meredam tekanan inflasi. Kondisi ini meningkatkan biaya dana (*cost of fund*) dan mempersempit margin keuntungan bank syariah. Dengan demikian, meskipun GCG diterapkan, kinerja keuangan tetap lebih dipengaruhi oleh faktor makroekonomi daripada oleh pengawasan internal.
- c. Fokus GCG pada kepatuhan, bukan profitabilitas Dewan komisaris independen dan komite audit dalam praktiknya lebih berorientasi pada *compliance* (pemenuhan regulasi OJK, DSN-MUI, dan peraturan perbankan syariah) dibandingkan pada strategi peningkatan profitabilitas. Oleh karena itu, keberadaan mereka lebih menjaga keberlangsungan operasional dan kepercayaan publik daripada mendorong kenaikan kinerja keuangan.
- d. Kinerja Bank Syariah dipengaruhi variabel lain Faktor efisiensi operasional (BOPO), kualitas pembiayaan (NPF), serta inovasi produk digital perbankan syariah pada periode 2019–2023 lebih dominan dalam menentukan laba bank. Hal ini menjelaskan mengapa GCG melalui dewan komisaris independen dan komite audit tidak signifikan secara statistik terhadap kinerja keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) bank syariah di Indonesia periode 2019–2023. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh positif keduanya terhadap kinerja keuangan ditolak.

Meskipun secara teori agensi peran pengawasan diharapkan mampu meningkatkan kinerja, dalam praktiknya pada periode penelitian ini peran tersebut tidak cukup kuat karena faktor eksternal seperti pandemi

COVID-19, kondisi makroekonomi, serta orientasi GCG yang lebih menekankan pada kepatuhan dibanding profitabilitas.

Temuaan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Henli Yoel Honi, dkk (2020) yang berjudul “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Tahun 2014-2018” yang menunjukkan bahwa uji simultan menunjukan bahwa Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko secara bersama sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai t-hitung $<$ t-tabel, dengan nilai $0.8715 < 1.664$ dengan probabilitas $0,3863 > 0,05$. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_a ditolak.
2. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai t-hitung $<$ t-tabel dengan nilai $0.8520 < 1.664$ dengan probabilitas $0,3970 > 0,05$. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_a ditolak.
3. Dewan komisaris independen dan komite audit secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F-hitung $<$ F-tabel dengan nilai $0.758534 < 3.12$ dengan probabilitas $0,4720 > 0,05$. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_a ditolak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan perlu menyadari bahwa penerapan *Good Corporate Governance* tidak hanya sebatas formalitas, namun perlu diiringi dengan efektivitas pengawasan dan keterbukaan informasi yang sebenarnya. Meski pengaruh secara statistik dalam penelitian ini tidak signifikan secara parsial, penerapan GCG tetap menjadi pondasi penting dalam menciptakan nilai jangka panjang perusahaan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar awal dalam mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar memasukkan variabel-variabel lain yang lebih spesifik seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan instusional, dewan pengawas syariah, dewan direksi. Selain itu, penggunaan data panel dengan banyak jumlah perusahaan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan model analisis yang lebih kuat.

3. Bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi kalangan akademik, khususnya dalam bidang perbankan. Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel GCG dan kinerja keuangan tidak selalu linear atau signifikan, sehingga penting untuk menganalisis laporan keuangan dan GCG secara lebih mendalam dan kontekstual. Penelitian ini juga dapat dijadikan contoh dalam penerapan analisis regresi data panel dengan data panel menggunakan perangkat lunak *evIEWS* 13

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Leon A, D. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif Konsep dan Aplikasi. In *Metode Penelitian Kuantitatif Konsep Dan Aplikasi* (P. 238). CV. Mega Press Nusantara.
- Adi, S. A. P., & Suwarti, T. (2022). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Studi Empiris Pada Perbankan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 13(2), 585.
- Andayani Anggy Ferrita Permata. (2013). *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Dan Sharia Compliance*. 37.
- Azis, A., & Hartono, U. (2017). Pengaruh *Good Corporate Governance*, Struktur Modal, Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 5(3), 1–13.
- Badawi & Hartati, W. (2024). Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*). In *Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)*). Cv Budi Utama.
- Candra, E. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. *Jurnal Ar-Ribhu*, 4(1), 169–194.
- Dianawati, Cici Putri. 2016. *Pengaruh CSR Dan GCG Terhadap Nilai Perusahaan: Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening*. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen* : Volume 5, Nomor 1
- Djanegara, M. S. (2008). Menuju Good Corporate Governance: Suatu kajian empiris. In *Menuju Good Corporate Governance: Suatu kajian empiris*. Kesatuan Press.
- Dr. A. Junaedi, S.H., Ms. (2020). *Penerapan Good Corporate Governance (GCG) untuk Pengamanan Aset Perusahaan*. Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Dr. Hasnatati, S. M. (2014). *Komisaris Independen dan Komite Audit: organ perusahaan yang berperan untuk mewujudkan GCG di Indonesia*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Fajri, F. (2022). Influence Of *Good Corporate Governance* On Financial Sector Soe Companies Financial Performance. *Risma*, 2(2), 307–320.

- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadyan, M. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan. *Jurnal Akuntansi Kompetif, Online ISSN:2622-5379*, 4(2), 181–188.
- Hania Pebriana, K. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akutansi*, 1(1), 4.
- Haryani Iswi & Purnomo, R. S. D. (2010). Buku pintar hukum bisnis pasar modal (strategi investasi saham, obligasi waran, right, opsi, reksadana & produk pasar modal syariah). In *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal (Strategi Tempat Investasi Saham, Obligasi Waran, Right, Opsi Reksadana & Produk Pasar Modal Syariah)* (p. 29). Transmedia Pustaka.
- Herusetya, A. (2025). Praktik Stata 18.0 pada Pemodelan Analisis Data Panel studi Ilmu Akuntansu dan Keuangan: Tip dan Trik untu Peneliti Pemula dan Mahasiswa. In *Praktik Stata 18.0 pada Pemodelan Analisis Data Panel studi Ilmu Akuntansu dan Keuangan: Tip dan Trik untu Peneliti Pemula dan Mahasiswa*. NEM-Anggota IKAPI.
- Hutabarat, F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan. In G. Puspitasari (Ed.), *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*. Desanta Mulia Visitama.
- Honi, H., Saerang, I., & Tulung, J. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Tahun 2014-2018. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(3), 296–305.
- Indah S, M. N. (2023). Statistik Deskriptif Dan Induktif. In *Statistik Deskriptif Dan Induktif* (P. 274). Cv. Graha Ilmu.
- Junaedi, D. . (2020). Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk Pengamanan Aset Perusahaan. In A. C (Ed.), *Penerapan Good Corporate Governance (GCG) untuk pengamanan aset perusahaan* (pp. 39–42). Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Kurniawati, M. (2019). Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. *Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- Mauliddiyah, N. L. (2021). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. 6
- Nisfiannoor, M. (2009). Pendekatan Statistika Modern Untuk Ilmu Sosial. In A. N. Dini (Ed.), *Pendekatan Statistika Modern Untuk Ilmu Sosial* (p. 92). Salemba Humanika.
- Novitasari, D. P. (2017). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar DI BEI Tahun 2012-2016). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 6, 106–119.
- Pane, I. Dkk. (2022). Metodologi Penelitian. In *Metodologi Penelitian*. CV Kreator Cerdas Indonesia.
- Priadana, Sidik dan Sunarsi, D. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif. In *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pascal Books.
- Purnomo, R. A. (2017). Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS. In P. C. Ambarwati (Ed.), *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*. CV.Wade Group.
- Rahmadani, F. D., & Rahayu, S. M. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Profitabilitas dan Leverage terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Pada BEI Periode 2013-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 52(1), 173–182.
- Rifkhan. (2023). Pedoman Metodologi Penelitian Data Panel dan Kuesioner. In *Pedoman Metodologi Penelitian Data Panel dan Kuesioner*. CV. Adanu Abimata.
- Rimardhani, H. (2016). *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bei*. 31(1), 167–175.
- Sadi Is, D. M. (2022). Hukum Perbankan Syariah: Dalam Perspektif Dogmatik Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum. In *Hukum Perbankan Syariah: Dalam Perspektif Dogmatik Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Pp. 174–175). Setara Press.
- Salsabila, S., Ruhadi, R., Laksana, B., & Ruhana, N. (2023). Analisis Pengaruh NPF, FDR, CAR, dan GCG terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 3(2), 337–346.

- Santosa, Purbayu Budi & Hamdani, M. (2007). Statistika Deskriptif Dalam Bidang Ekonomi Dan Niaga. In *Statistik Deskriptif Dalam Bidang Ekonomi Dan Niaga* (p. 256). Erlangga.
- Santoso, S. (2019). Mahir Statistik Parametrik. In *Konsep Dasar dan Aplikasi dengan SPSS*. PT Elex Media Komputindo.
- Saputra, F. E. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2016-2018. *TECHNOBIZ : International Journal of Business*, 3(1), 45.
- Sari, M. (2021). Oleh. In Jufrizen (Ed.), *Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis Good Corporate Governance*. UMSU Press.
- Sudana, I. (2015). *Manajemen Keuangan Perusahaan, Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga
- Sunyoto, Danang. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Buku Seru.
- Suryanto, A., & Refianto. (2019). Analisis Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Bina Manajemen*, 8(1), 1–33.
- Syaifullah, Muhammad, D. (2020). *Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Asset Quality, Earnings, Liquidity, dan Sharia Conformity* (1st ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Syofyan, E. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. In *Good Corporate Governance (GCG)* (P. 105). Unisma Press.
- Umam, K. & A. V. (2015). *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah*. Gadjah Madauniversity Press.
- Utomo, Mohamad Nur, (2019). *Ramah Lingkungan dan Nilai Perusahaan*. Surabaya: CV. Jakad Publishing.
- Zendrato, A., Waoma, S., & Zalogo, E. F. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Pada PT Gudang Garam Tbk Tahun 2008-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 4(2).